

BIMTEK PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN (SPIP TERINTEGRASI)

SEBELUM

SESUDAH

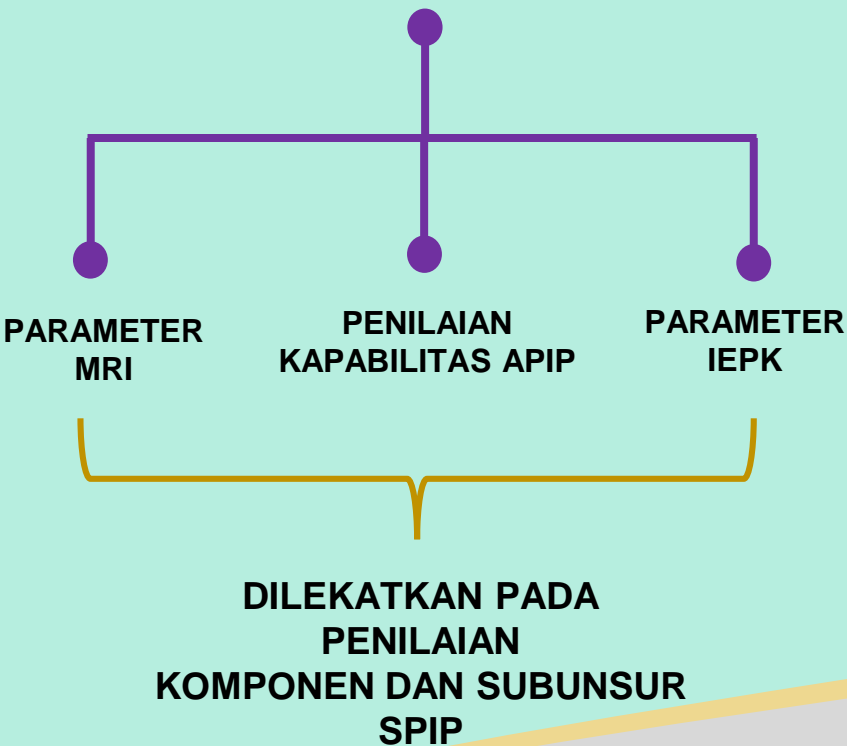
Objek Penilaian	Struktur dan proses	Perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil
Kaitan dengan 4 Tujuan SPIP	Belum dikaitkan	Dikaitkan secara langsung
Penentuan Satker Sampel	Berdasarkan keterwakilan fungsi	Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis, dan tujuan SPIP
Penilaian Efektivitas Pengendalian	Belum diarahkan	Diarahkan
Metodologi Penilaian	Terkesan <i>document based</i>	Mengedepankan <i>substance over form</i>
Pengintegrasian Penilaian	Hanya menilai unsur-unsur SPIP	Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP
Fokus Penilaian	Lebih kepada pemberian skor/level	Penentuan Aol dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
Proses Penilaian	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak dalam satu proses	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas menjadi satu proses dan dilakukan oleh K/L/D

POIN PEMBAHARUAN PENILAIAN RESULT BASED SPIP/NEW SPIP

1

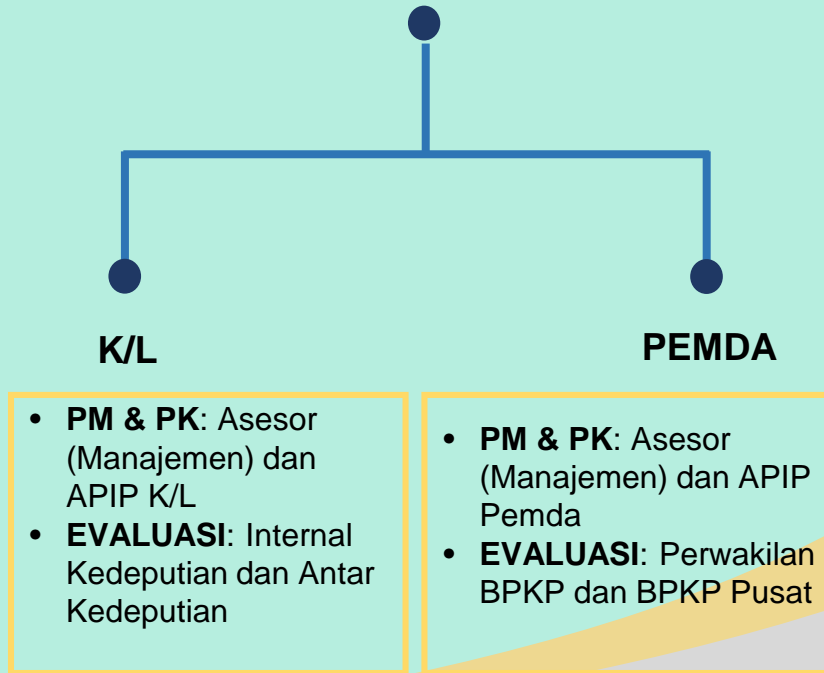
PARAMETER PENILAIAN TERINTEGRASI

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN



2

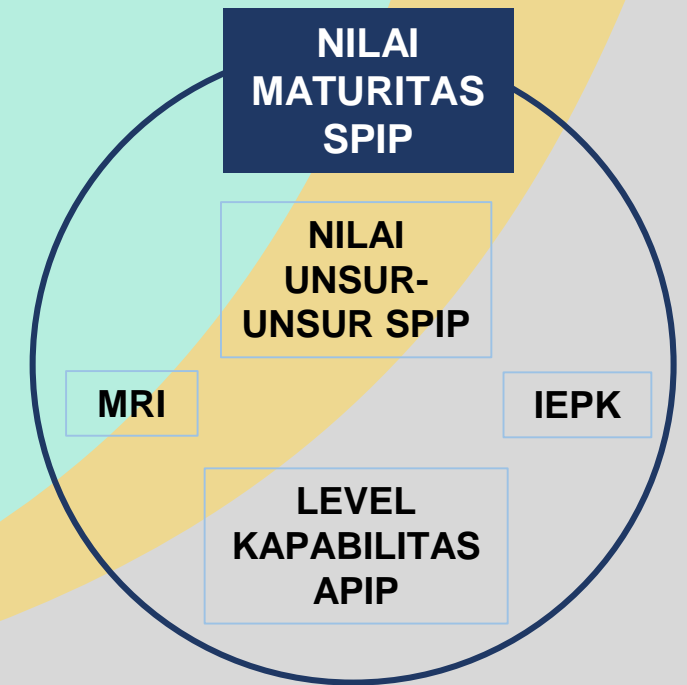
KOLABORASI K/L/D DAN BPKP DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



***PM:** Penilaian Mandiri **PK:** Penjaminan Kualitas

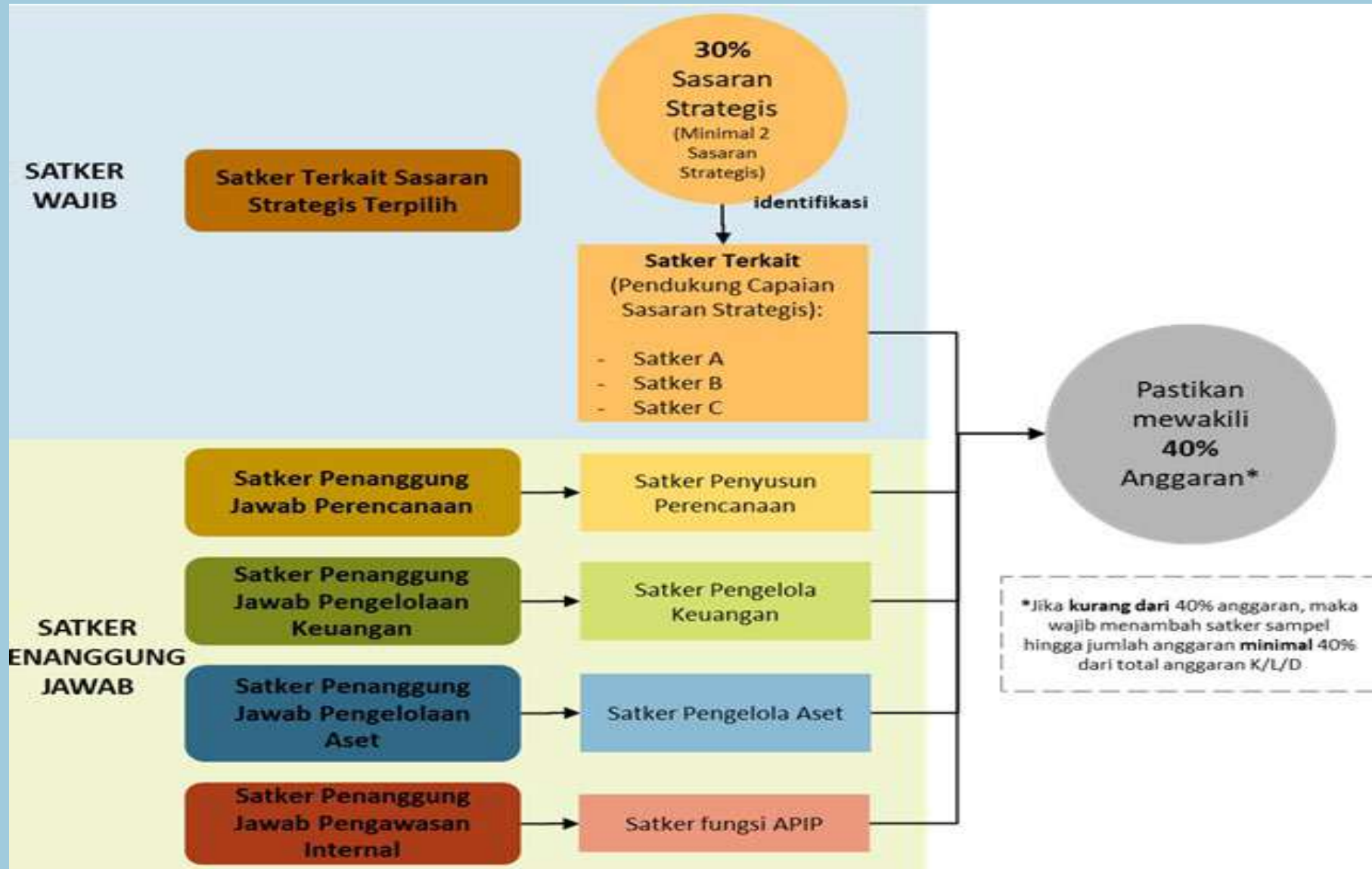
3

4 NILAI DALAM MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



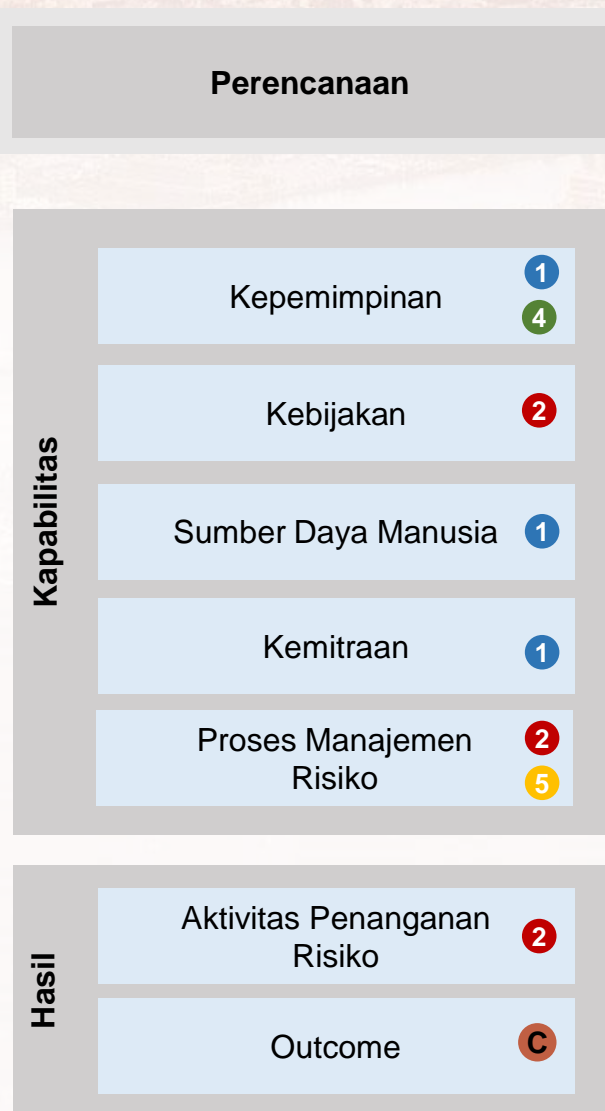
***MRI:** Manajemen Risiko Indeks
IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

MEKANISME PENETAPAN SATKER PK



INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

MANAJEMEN RISIKO INDEKS



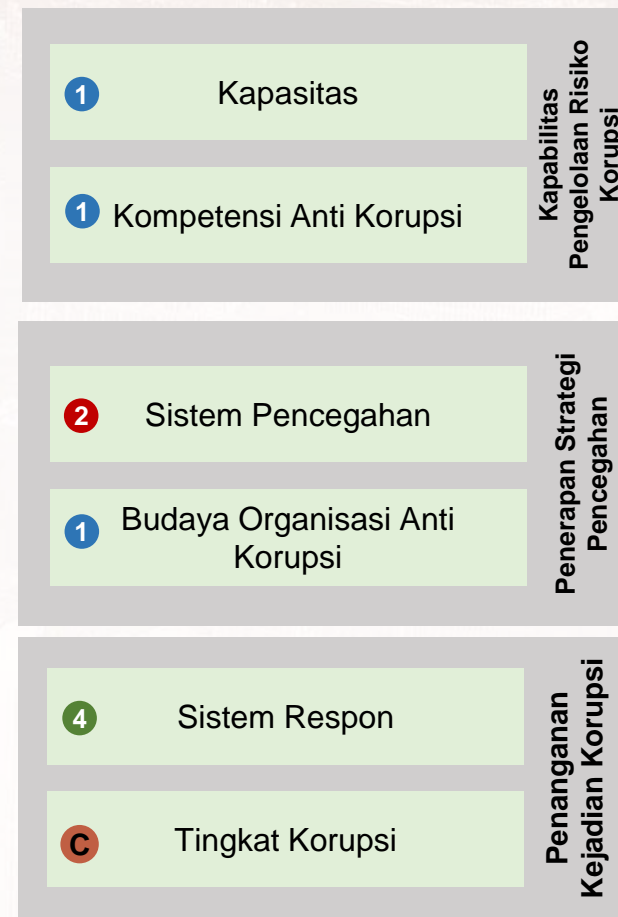
Adaptasi: HM Treasury

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



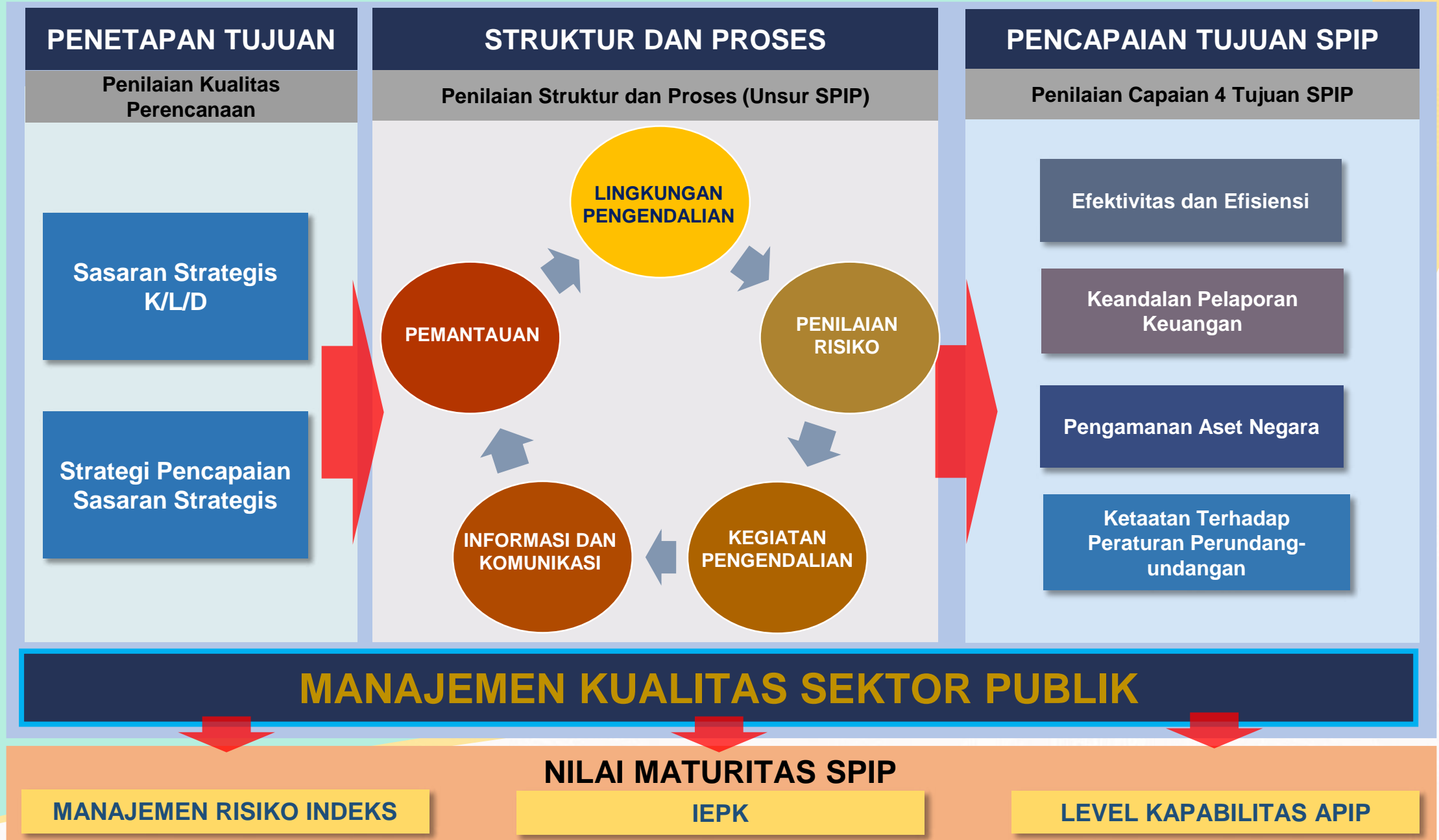
Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



Sumber: FRM

FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP





KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP



OPTIMUM (Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, dengan struktur dan proses **pengendalian telah efektif** untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta **adaptif terhadap perubahan** lingkungan organisasi.

TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, struktur dan proses **pengendalian telah efektif** namun **belum adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERDEFINISI (Level 3)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, serta **pengendalian telah dilaksanakan** namun **belum efektif**.

BERKEMBANG (Level 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik**, namun **strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan** serta pelaksanaan **pengendalian masih sebatas pemenuhan**.

RINTISAN (Level 1)

Organisasi **belum mampu mendefinisikan kinerjanya**, termasuk **strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya**.

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS

KARAKTERISTIK LEVEL

Menyusun
Perencanaan
Kinerja

Mampu
Mendefinisikan
Kinerja

Strategi
Pencapaian
Relevan
dan Terintegrasi

Desain dan
Kebijakan
Pengendalian

Struktur dan
Proses
Pengendalian
Telah
Dilaksanakan

Struktur dan
Proses
Pengendalian
Efektif

Adaptif
Terhadap
Perubahan

5



4



3



2



1



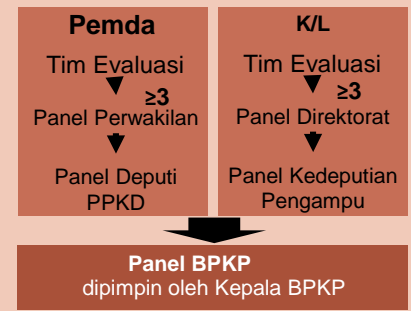
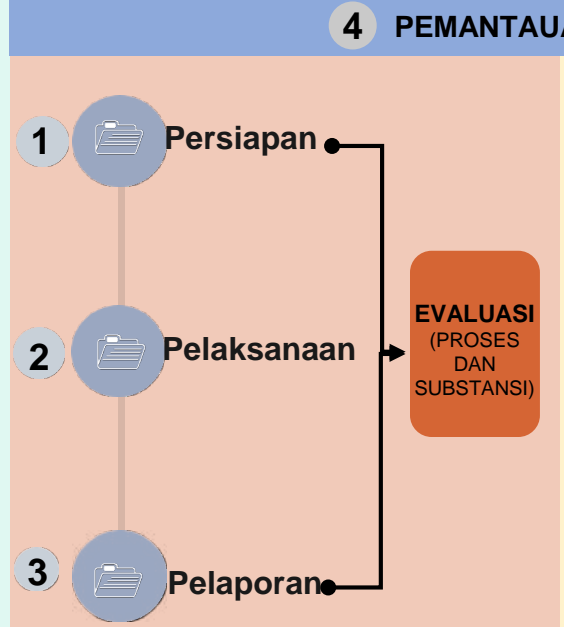
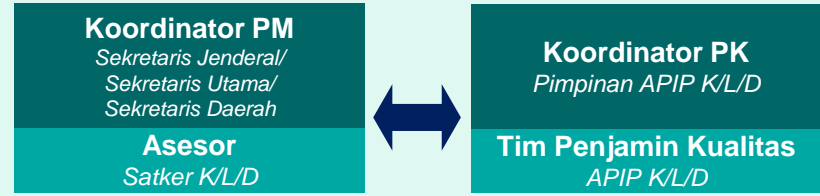
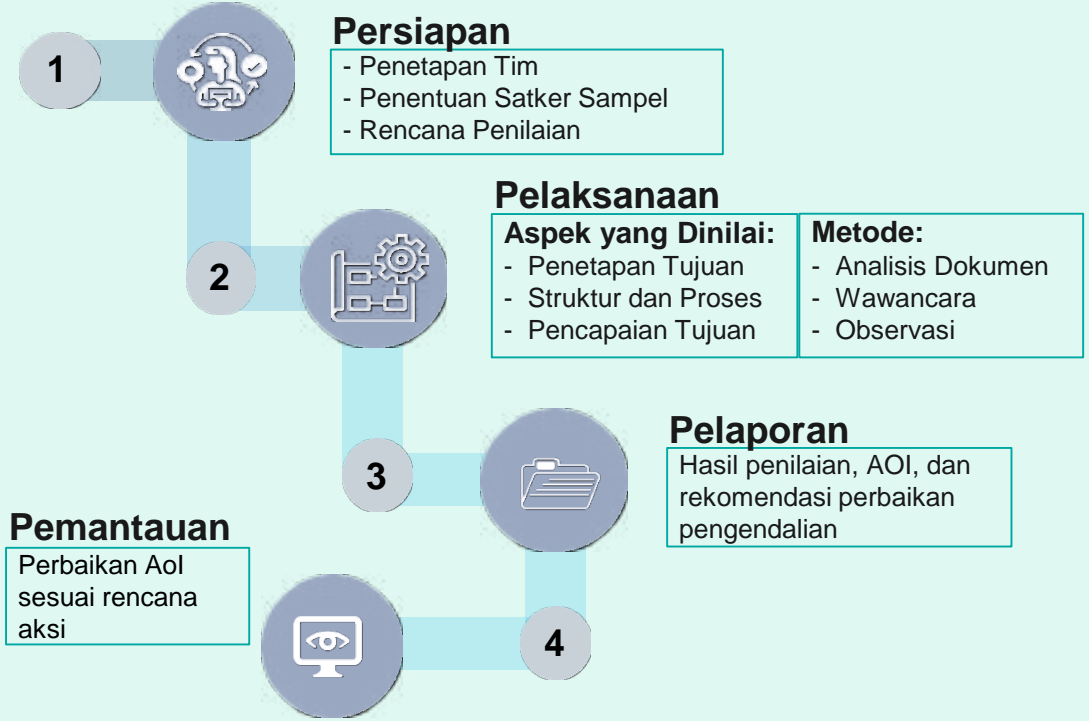
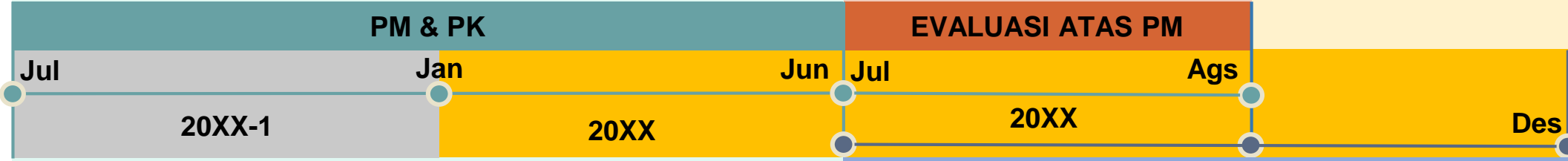
P R O S E S B I S I S



PENILAIAN MANDIRI/ PENJAMINAN KUALITAS

PENETAPAN LEVEL SPIP

PERBAIKAN BERKELANJUTAN



2

PROSES PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (NEW SPIP)





PENILAIAN MANDIRI & PENJAMINAN KUALITAS

1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pembentukan Tim PM DAN PK



Tim PM Min. 1/3 pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP & penilaian SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkait SPIP, (Untuk Tim PK 100%)

Jumlah personil mempertimbangkan kompleksitas satker, serta pemahaman atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.



Penugasan kepada Tim PM dan PK didukung dengan mandat yang disampaikan secara formal ST/SK dan sejenisnya.

Penetapan siklus kegiatan, penganggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan PM dan PK.



b. Penentuan Satker Sampel PK

Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 1

- Satker penanggungjawab perencanaan
- Satker - Satker wajib atas pencapaian Sasaran Strategis terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 2

- Satker penanggungjawab pengelolaan keuangan
- Satker - Satker wajib atas pencapaian Sasaran Strategis terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 3

- Satker penanggungjawab pengelolaan aset
- Satker - Satker wajib atas pencapaian Sasaran Strategis terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 4

- Satker pengawasan internal (APIP)
- Satker - Satker wajib atas pencapaian Sasaran Strategis terpilih.

c. Pemaparan Rencana Penilaian



Substansi Rencana Penilaian:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan dan Manfaat
- c. Ruang Lingkup Metodologi yang Digunakan
- d. Tahapan dan Jadwal Waktu
- e. Sistematika Pelaporan
- f. Rencana Kebutuhan Sumber Daya
- g. Susunan Tim PM dan PK

Tujuan Pemaparan:

- a. Mendapatkan kesepakatan pimpinan/pejabat kunci
- b. Memperoleh persamaan persepsi antara assessor dengan pimpinan/pejabat kunci



2. TAHAP PELAKSANAAN

TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI PEMENUHAN PARAMETER PENILAIAN MATURITAS SPIP



WAWANCARA



DOKUMEN



OBSERVASI

OBJEK PENILAIAN

- Pihak yang memahami proses bisnis organisasi,
- Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan parameter, dan
- Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang didapati di lingkungan organisasi yang dinilai.

PENDEKATAN

- Kaitkan dengan 4 Tujuan SPIP,
- Berdasarkan kriteria dalam parameter subunsur SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi

LINGKUP

- Wawancara, observasi, dan penggalian bukti dokumen disesuaikan dengan proses bisnis organisasi;
- Dilakukan dalam lingkup pengujian kualitas perencanaan, struktur dan proses, pencapaian hasil.

PERNYATAAN BAHWA PROSES PENILAIAN MANDIRI TELAH DIJAMIN KUALITASNYA OLEH APIP

VALIDASI DAN PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI

CEK KESESUAIAN ANTARA HASIL PENGUJIAN BUKTI DENGAN PARAMETER

- ANALISIS HASIL WAWANCARA
- ANALISIS DOKUMEN
- ANALISIS HASIL OBSERVASI

PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP K/L/D



2.1. TAHAP PELAKSANAAN: PENILAIAN ATAS KOMPONEN I PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN

KENAPA PERENCANAAN PENTING?

Apakah tujuan sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
Apakah indikator keberhasilannya tepat?





PENETAPAN TUJUAN

TUJUAN PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

MEMASTIKAN **SASARAN ORGANISASI BERORIENTASI HASIL** DENGAN INDIKATOR YANG TEPAT, SERTA PEMILIHAN **STRATEGI PENCAPAIAN** SASARAN ORGANISASI YANG **EFEKTIF DAN EFISIEN**.

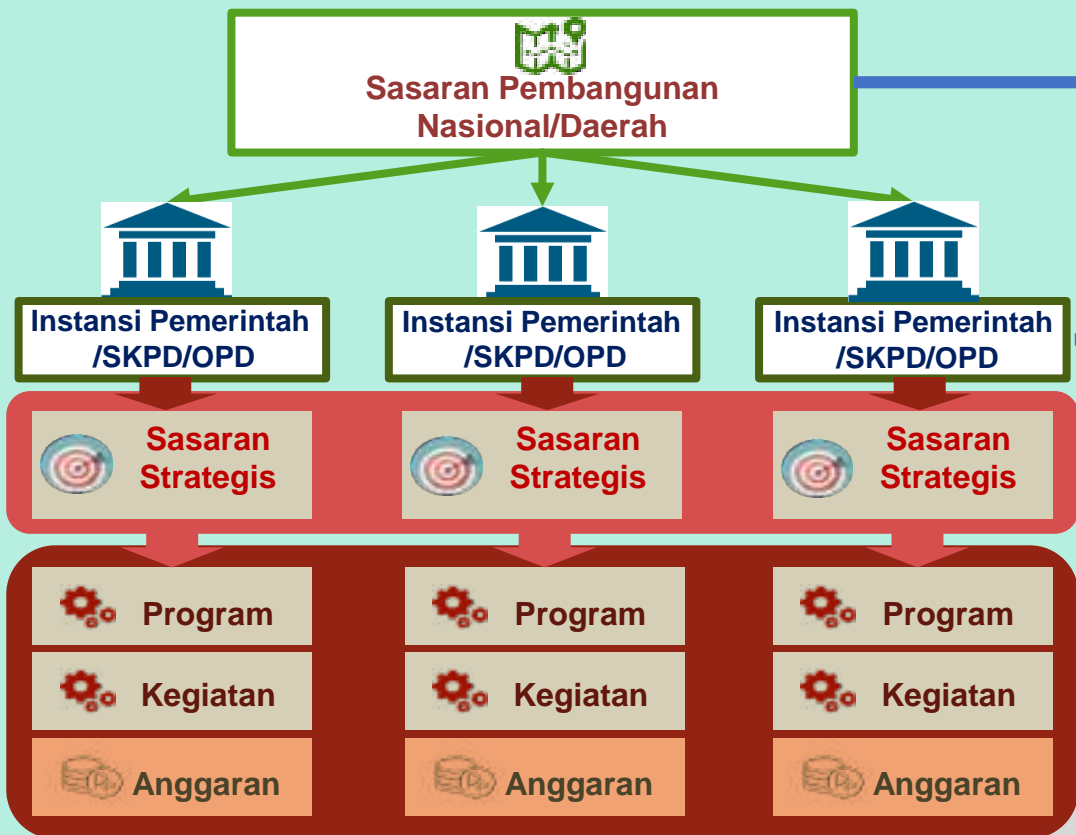


UNSUR YANG DINILAI

1. SASARAN STRATEGIS K/L/D
2. INDIKATOR KINERJA
3. TARGET KINERJA
4. CROSS CUTTING SASARAN STRATEGIS KE SASARAN SATKER

1. CASCADING KINERJA
2. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN K/L/D
3. INDIKATOR KINERJA
4. TARGET KINERJA

ACTIVITY GOALS



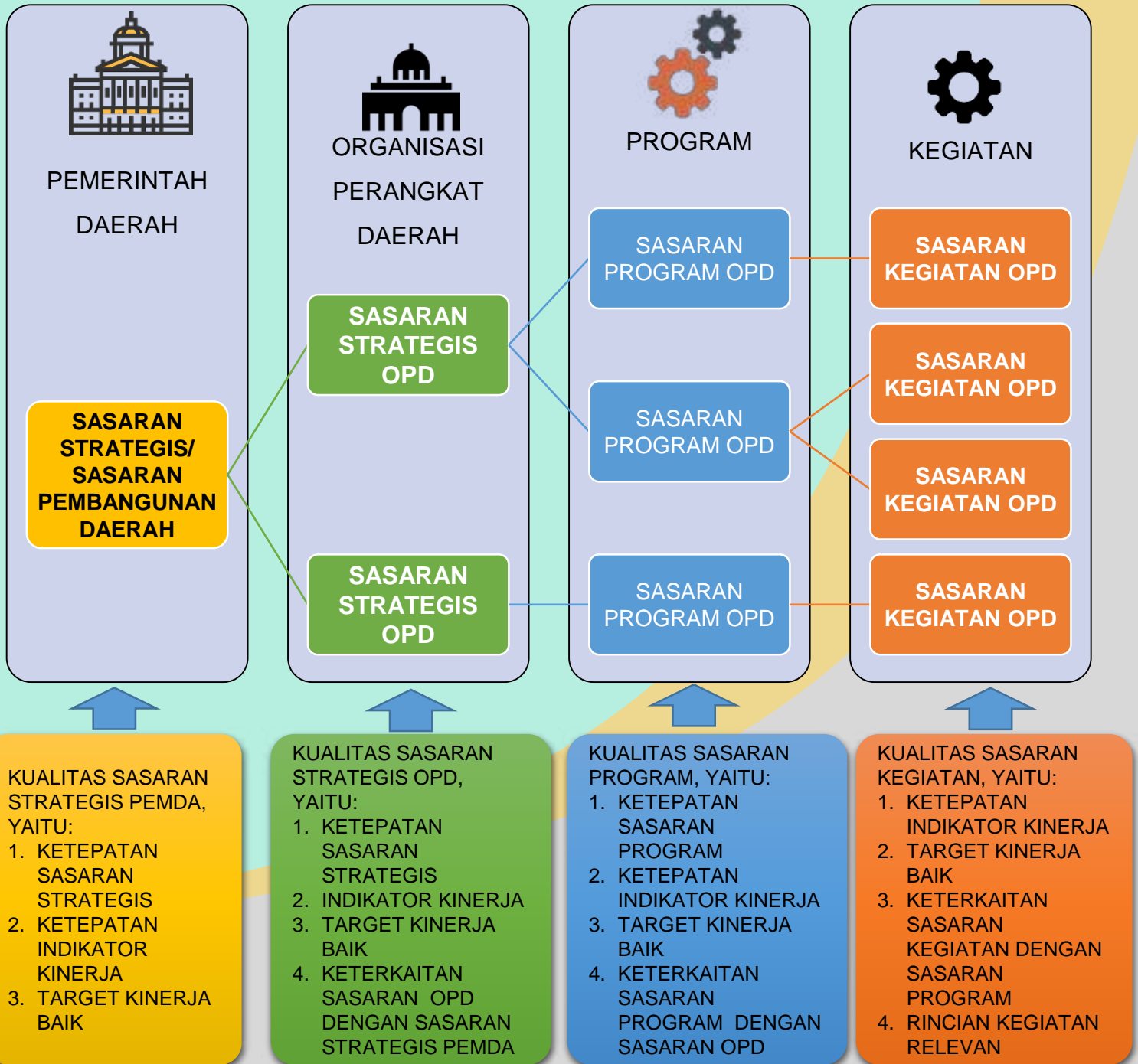


PENETAPAN TUJUAN PEMERINTAH DAERAH



Sumber Dokumen:

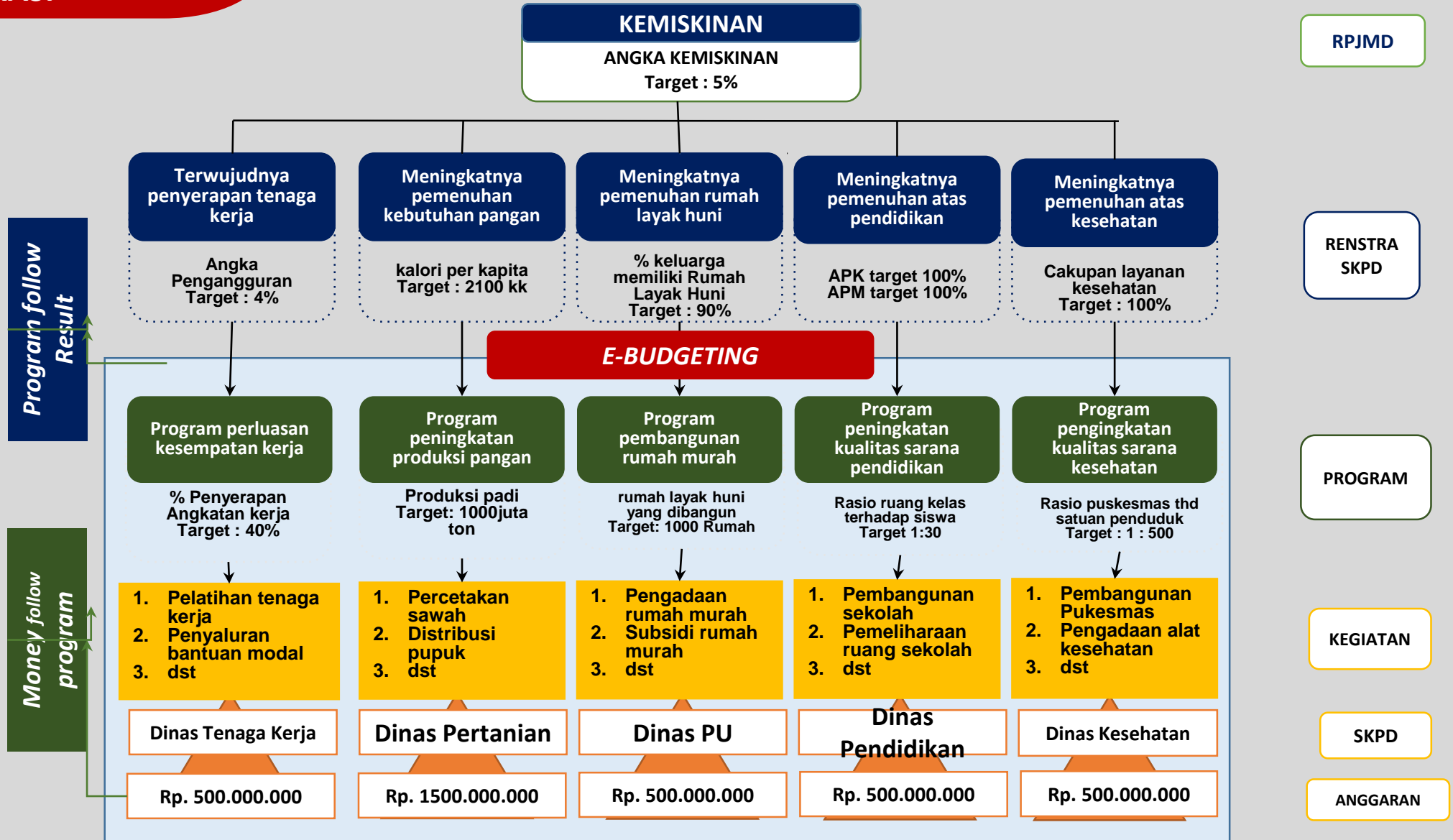
- Perkin Kepala Daerah
- Perkin Kepala OPD s.d Pengelola Kegiatan
- DPA OPD



04

Perencanaan Terintegrasi

CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI



PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM MANAJEMEN KINERJA



ANGGARAN



KINERJA

**PRIORITAS
PEMBANGUNAN**



**Manajemen Kinerja
Instansi Pemerintah**



JELAS



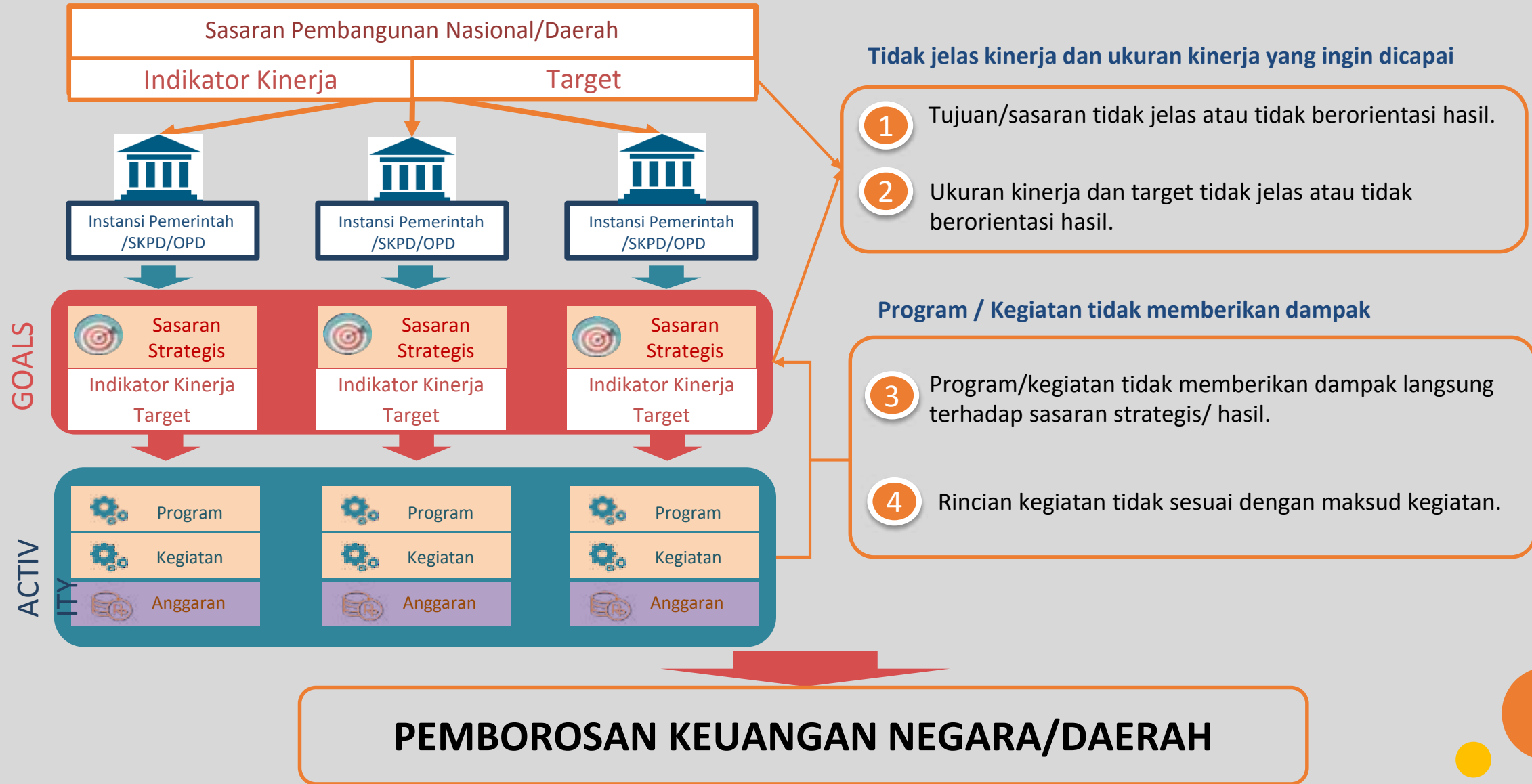
TERUKUR



TERPERINCI

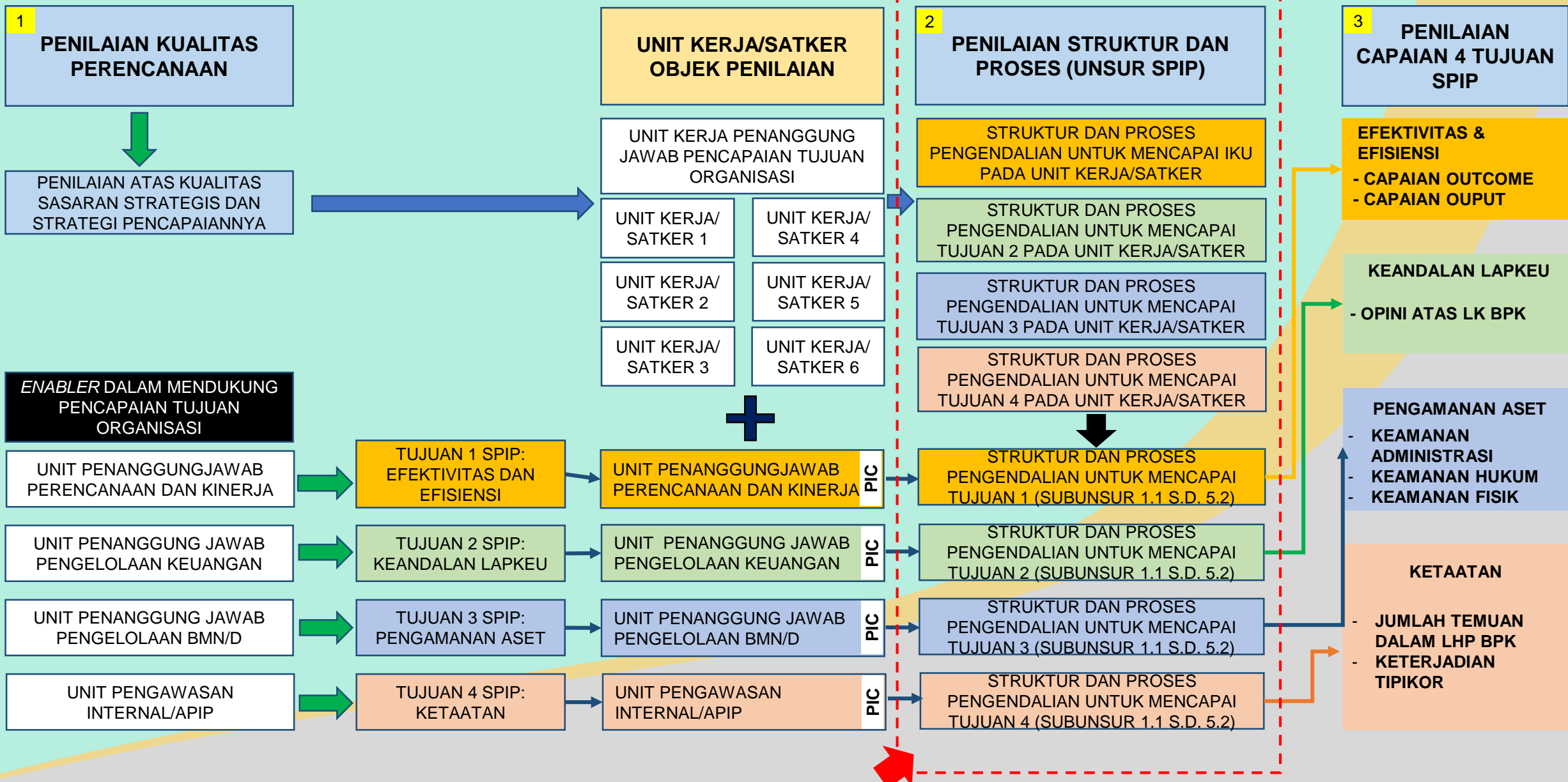
**SEHINGGA SETIAP RUPIAH YANG DIBELANJAKAN
AKAN MEMILIKI MANFAAT SECARA JELAS DAN NYATA
BAGI MASYARAKAT**

KESALAHAN DALAM PERENCANAAN



**2.2. TAHAP PELAKSANAAN: PENILAIAN ATAS KOMPONEN
PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
PENGENDALIAN INTERN
(UNSUR-SUBUNSUR SPIP)**

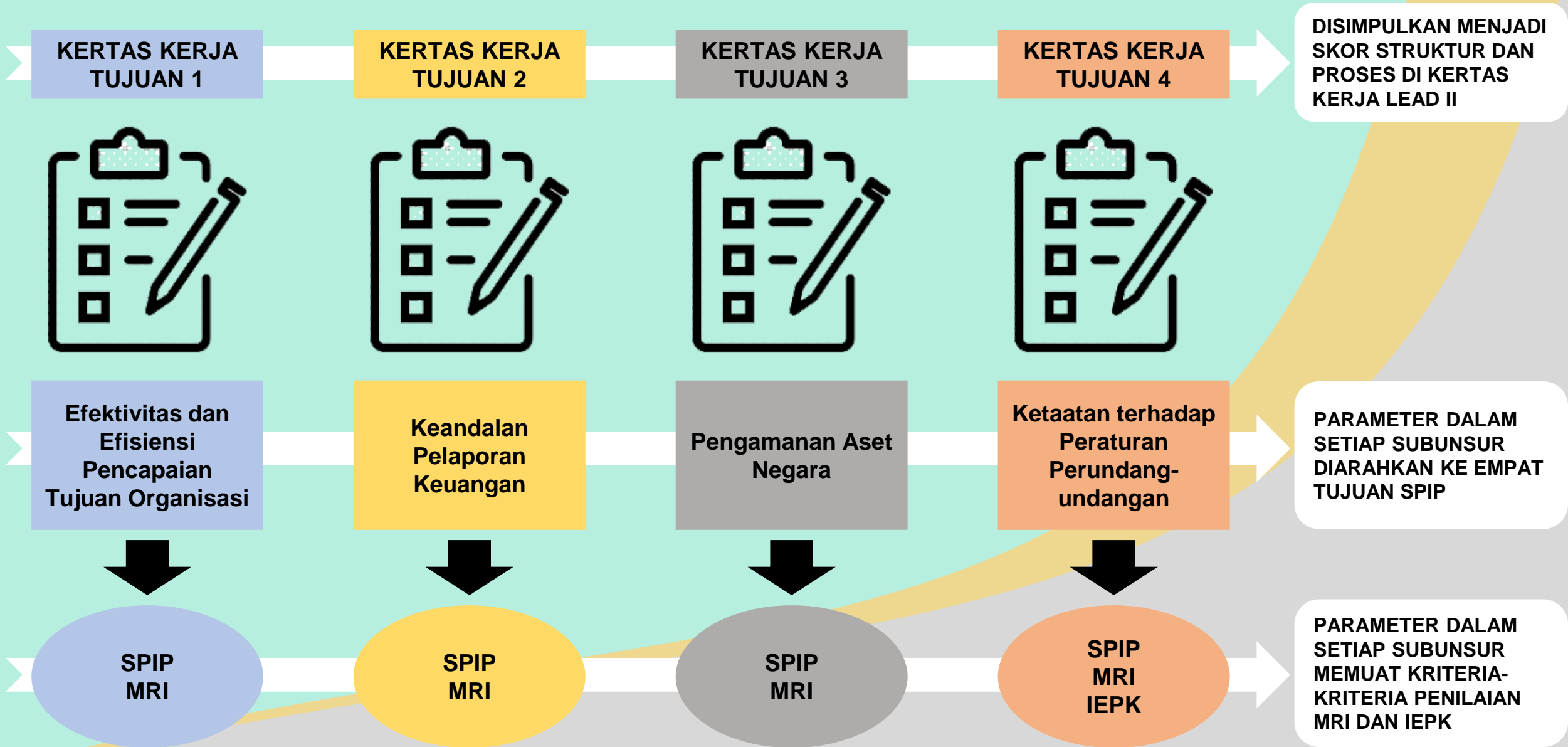
ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (FOKUS 4 TUJUAN SPIP)



PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES MERUPAKAN PENILAIAN PARAMETER SUB UNSUR SPIP (SEPERTI PADA TOOLS PENILAIAN SEBELUMNYA) NAMUN DI-UPDATE UNTUK MASING-MASING TUJUAN SPIP (4 KERTAS KERJA) DAN MENCAKUP PARAMETER MRI SERTA IEPK.

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100.00%	
TOTAL BOBOT		100.00%

KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

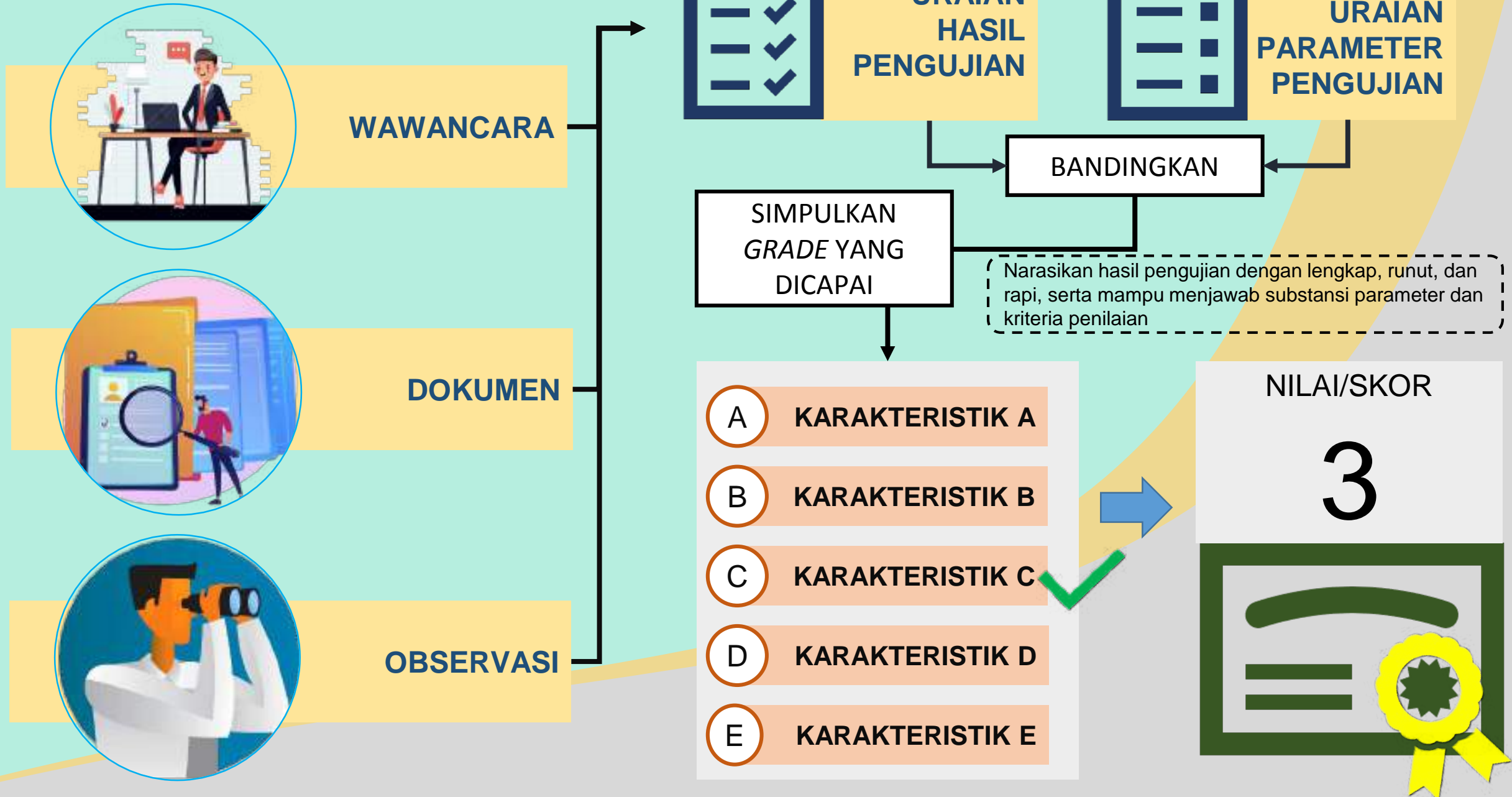


GAMBARAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian Satker 1	Hasil Pengujian Satker 2	Hasil Pengujian Satker 3	Kesimpulan Akhir (Y/T)
		SPIP	MRI	IEPK								
1.1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA											3
1	K/L/D menegakan integritas dan nilai etika	V	V	-	A	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				
		V	V	-	B	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi	(..narasi..) Simpulan: Y			
		V	V	-	C	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi		MODUS (..narasi..) Simpulan: Y	(..narasi..) Simpulan: Y	Y
		V	V	-	D	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				
		V	V	-	E	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				

*Contoh pengisian kertas kerja hasil pengujian pada slide berikutnya.

ALUR PENYIMPULAN



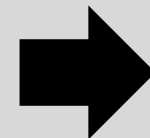
**CONTOH PADA KERTAS KERJA T1
Subunsur 3.2
Pembinaan SDM**

**Parameter:
Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.**

<p>Kriteria E: Terdapat kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi</p>	<p>Kriteria D: Kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan</p>	<p>Kriteria C: Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi</p>	<p>Kriteria B: Kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>Kriteria A: Pembinaan SDM organisasi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p>
<p>Penjelasan: Kebijakan telah mengatur: - Prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai - Rencana pengembangan karir pegawai - Sistem penilaian kinerja pegawai - Sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai untuk seluruh pegawai baik pimpinan maupun staf</p>	<p>Penjelasan: - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan SDM - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai</p>	<p>Penjelasan: - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi - Pembinaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun - Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangkan gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan SDM/Man</p>	<p>Penjelasan: Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p>	<p>Penjelasan: - Pembinaan SDM telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis - Pembinaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pembinaan SDM-nya</p>

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

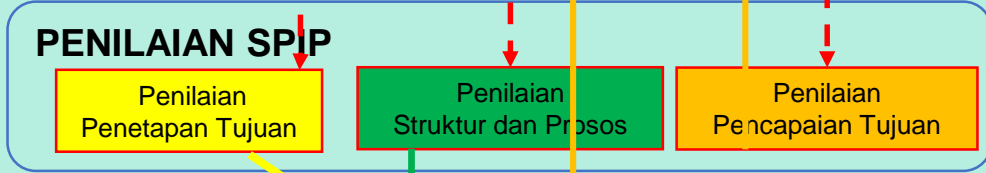
Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. Dinas Pertanian telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti Diklat Penyuluh Pertanian sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Pemkab.



PENGUKURAN MRI DALAM PARAMETER SUBUNSUR SPIP

MAPPING PARAMETER PENGUKURAN MRI DALAM PENGUKURAN SPIP

PENILAIAN SPIP	AREA/KOMPONEN PENILAIAN MRI							
	PERENCANAAN	KAPABILITAS						HASIL
	KUALITAS PERENCANAAN	KEPEMIMPINAN	KEBIJAKAN MR	SUMBER DAYA MANUSIA	KEMITRAAN	PROSES MR	AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	OUTCOMES
1. PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN	2 Parameter							
2. PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES								
Subunsur 1.3		3 Parameter						
Subunsur 1.6				2 Parameter				
Subunsur 1.8					1 Parameter			
Subunsur 2.1			1 Parameter			2 Parameter		
Subunsur 2.2						3 Parameter	2 Parameter	
Subunsur 4.1		1 Parameter				2 Parameter		
Subunsur 5.1						3 Parameter		
3. PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN								1 Parameter
JUMLAH	2 Parameter	4 Parameter	1 Parameter	2 Parameter	1 Parameter	10 Parameter	2 Parameter	1 Parameter



AREA/KOMPONEN PENILAIAN MRI	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)
PERENCANAAN		40,00%	1,40
KUALITAS PERENCANAAN	3,50	40,00%	1,40
KAPABILITAS		30,00%	0,59
KEPEMIMPINAN	1,89	5,00%	0,09
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	1,75	5,00%	0,09
SUMBER DAYA MANUSIA	2,00	5,00%	0,10
KEMITRAAN	3,00	2,50%	0,08
PROSES MANAJEMEN RISIKO	1,86	12,50%	0,23
HASIL		30,00%	0,68
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	1,82	18,75%	0,34
OUTCOMES	3	11,25%	0,34
			2,67

❖ SKOR Komponen = Nilai Rata2 Parameter Pada komponen

PENGUKURAN IEPK DALAM PARAMETER SUBUNSUR SPIP

MAPPING PARAMETER PENGUKURAN IEPK DALAM PENGUKURAN SPIP

PENILAIAN SPIP	AREA/KOMPONEN PENILAIAN IEPK											
	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI					PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN				PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		
	KEBIJAKAN ANTI KORUPSI	SEPERANGKAT SISTEM ANTI KORUPSI	DUKUNGAN SUMBER DAYA	POWER (KUASA DAN WEWENANG)	PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI	ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	KEPEMIMPINAN ETIS	INTEGRITAS ORGANISASIONAL	IKLIM ETIS PRINSIP	INVESTIGASI	TINDAKAN KOREKTIF
2. PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES												
Subunsur 1.1	1 parameter	1 parameter			1 parameter				1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter
Subunsur 1.3			1 parameter	1 parameter				1 parameter				
Subunsur 2.2						1 parameter						
Subunsur 4.1							1 parameter					
Jumlah	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter	1 parameter

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,80
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,50	0,11
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,88	0,14
POWER (KUASA & WEWENANG)	14,40%	1,88	0,27
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,62
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,82	0,16
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	1,95	0,07
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	1,88	0,17
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,50	0,11
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,50	0,11
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,24
INVESTIGASI	8,00%	1,50	0,12
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,50	0,12
TOTAL	100%		1,66

T 1 Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- Capaian *Outcome* (efektivitas)
- Capaian *Output* (efisiensi)

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun sesuai karakter organisasi (misal: kode etik tenaga kesehatan, kode etik penyuluh pertanian, kode etik pelayanan, kode etik tenaga pendidik, dsb.) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

1.5 Pendelegasian wewenang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan misal pendelegasian wewenang perizinan, pencetakan dokumen kependudukan di kecamatan s.d. kelurahan, dsb.

3.3 Sistem informasi dibangun dan dikelola untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi misalnya sistem yang terkait dengan pengelolaan data perizinan, kependudukan, dsb.

T 2 Keandalan Pelaporan Keuangan

Opini BPK-RI atas LK K/L/P

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun dalam proses pengelolaan keuangan di organisasi tsb. misal larangan rangkap jabatan pengelola keuangan untuk menghindari *conflict of interest*, penandatanganan SPTJM untuk pengeluaran tanpa bukti yang memadai, dsb.

1.5 Pendelegasian wewenang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan misal dari PA kepada KPA, Bendahara kepada Bendahara Pembantu, dsb. Pendelegasian terkait pembebedan anggaran dsb.

3.3 Sistem informasi dibangun dan dikelola untuk mendukung keandalan pencatatan dan akuntabilitas penggunaan sumber daya keuangan misal SIMDA, SIPD, SPAN, dsb.

T 3 Pengamanan Aset Negara

- Pengamanan Administrasi;
- Pengamanan Hukum; dan
- Pengamanan Fisik.

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun dalam proses pengelolaan aset di organisasi tsb. misal adanya keharusan pejabat pengadaan dan pemeriksa barang dijabat orang yg berbeda untuk memastikan spesifikasi yg diterima tepat, larangan bertemu antara penyedia dengan PPK, larangan penggunaan aset untuk keperluan pribadi dsb.

1.5 Pendelegasian wewenang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan aset

3.3 Sistem informasi dibangun dan dikelola untuk mendukung keandalan pencatatan aset, pengamanan aset, dan pengelolaan aset lainnya dari pengadaan s.d penggunaan misal SIMDA BMD

T 4 Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK
- Keterjadian Tipikor

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun dalam upaya mencegah ketidakpatuhan thdp peraturan perundangan dan upaya pencegahan fraud/korupsi seperti kegiatan penyuluhan anti korupsi, pembangunan value organisasi melalui ICV, bintal/kerohanian sesuai keyakinan masing-masing, dsb.

1.5 Pendelegasian wewenang misal dalam penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang (Gol IV s.d. I)

3.3 Sistem informasi dibangun dan dikelola dalam rangka mencegah penyimpangan thdp SOP dan mengurangi risiko fraud dalam pelaksanaan tugas pemerintahan seperti system *Wistle Blowing*, pengaduan masyarakat, pemantauan pelayanan publik, dsb.

PENENTUAN TEKNIK PENGUJIAN



WAWANCARA



DOKUMEN



OBSERVASI

OBJEK PENILAIAN

- Pihak yang memahami proses bisnis organisasi,
- Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan parameter, dan
- Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang didapati di lingkungan organisasi yang dinilai.

PENDEKATAN

- Kaitkan dengan 4 Tujuan SPIP,
- Berdasarkan kriteria dalam parameter subunsur SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi

LINGKUP

- Wawancara, observasi, dan penggalan bukti dokumen disesuaikan dengan proses bisnis organisasi;
- Dilakukan dalam lingkup pengujian kualitas perencanaan, struktur dan proses, pencapaian hasil.

ALUR PENYIMPULAN



WAWANCARA



DOKUMEN



OBSERVASI



URAIAN
HASIL
PENGUJIAN



DAFTAR
URAIAN
PARAMETER
PENGUJIAN

BANDINGKAN

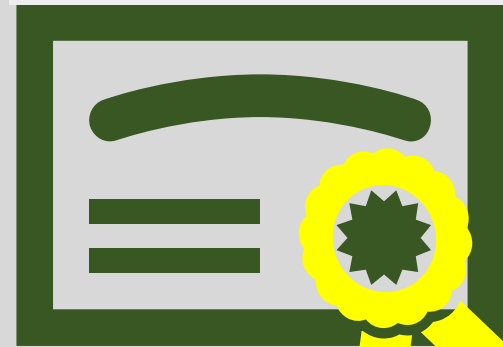
SIMPULKAN
GRADE YANG
DICAPAI

Narasikan hasil pengujian dengan lengkap, runut, dan rapi, serta mampu menjawab substansi parameter dan kriteria penilaian

- A KARAKTERISTIK A
- B KARAKTERISTIK B
- C KARAKTERISTIK C
- D KARAKTERISTIK D
- E KARAKTERISTIK E

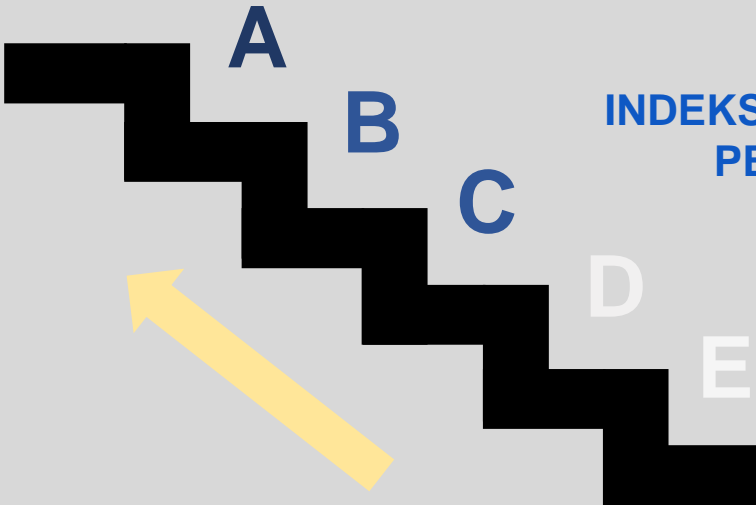
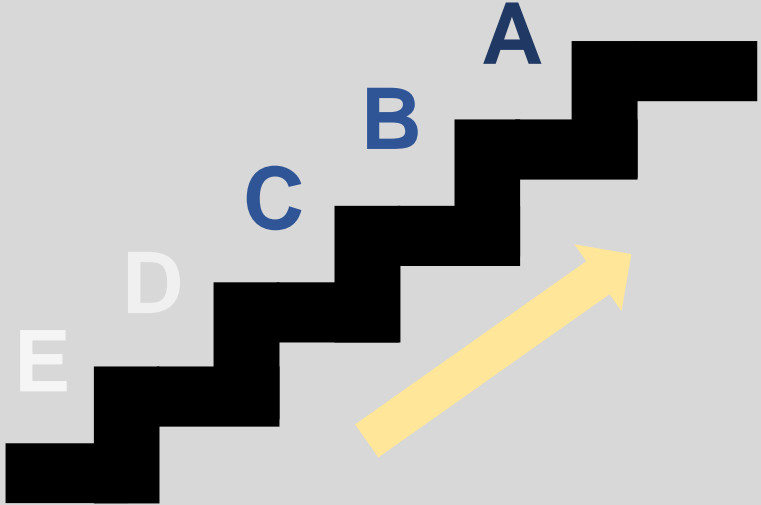
NILAI/SKOR

3



PILIHAN JAWABAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

SPIP



MANAJEMEN RISIKO INDEKS

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN PENGENDALIAN OPTIMAL

EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENGGOMUNIKASIAN & PEMAHAMAN ATAS SUBSTANSI KEBIJAKAN

FORMALITAS DAN KUALITAS KEBIJAKAN

A
B
C
D
E

Pilihan "A" merupakan pilihan yang menggambarkan kondisi optimal dan digradasi menurun hingga pilihan "E" yang menunjukkan kondisi pengendalian paling lemah

CONTOH KERTAS KERJA DAN PENYIMPULAN HASIL PENGUJIAN

No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian Satker 1	Hasil Pengujian Satker 2	Hasil Pengujian Satker 3	Kesimpulan Akhir (Y/T)
		SPIP	MRI	IEPK								
1.3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF										3	
2	Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko	V	V	-	A	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				
		V	V	-	B	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi	(..narasi..) Simpulan: Y			
		V	V	-	C	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi		MODUS (..narasi..) Simpulan: Y	(..narasi..) Simpulan: Y	Y
		V	V	-	D	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				
		V	V	-	E	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				

**PENENTUAN
SKOR DAN
AREA OF
IMPROVEMENT**

**KERTAS KERJA
T1**



**Efektivitas dan
Efisiensi
Pencapaian
Tujuan Organisasi**



**KERTAS KERJA
T2**



**Keandalan
Pelaporan
Keuangan**



**KERTAS KERJA
T3**



**Pengamanan Aset
Negara**



**KERTAS KERJA
T4**



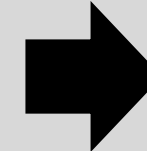
**Ketaatan terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan**



KERTAS KERJA LEAD II

**SKOR
STRUKTUR
DAN
PROSES**

**Catatan Hasil
Penilaian**



**AREA OF
IMPROVEMENT**

CONTOH PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES PADA PEMDA

x uXa 4

Misi:
Memperkuat
Kapasitas
Ekonomi Rakyat

Tujuan:
Stabilitas Ekonomi Daerah
yang Berkualitas, Menyebar,
dan Inklusif Berbasis Potensi
Unggulan

Sasaran:
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
Daerah Disertai Kesejahteraan Petani, dan
Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah

INDIKATOR PROGRAM

- Peningkatan Produksi Padi dan Hasil Tani Lainnya
- Peningkatan Sentra Industri Agro Menjadi Pemasok Industri Besar
- Peningkatan Sertifikasi Mutu Barang dan Komoditi Ekspor Daerah
- Peningkatan Destinasi Wisata dgn Keunikan Lokal Khas Daerah
- Peningkatan Capaian Realisasi PMA dan PMDN

- RENSTRA DINAS PERTANIAN & PERIKANAN
- RENSTRA DINAS KEHUTANAN
- RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN
- RENSTRA DINAS PERDAGANGAN
- RENSTRA DINAS PARIWISATA
- RENSTRA DINAS MODAL PTSP

- DINAS PERTANIAN & PERIKANAN
- DINAS KEHUTANAN
- DINAS PERDAGANGAN
- DINAS PARIWISATA
- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
- Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa
- Nilai Tukar Petani
- Pertumbuhan Investasi

INDIKATOR SASARAN (IKU)

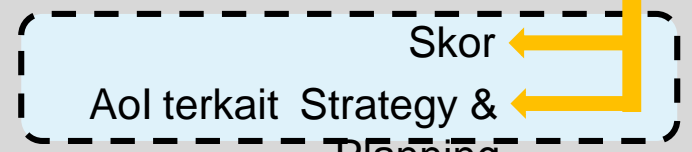
Penilaian
Kualitas
Perencanaan

DIUJI PENETAPAN
TUJUANNYA DAN
INDIKATORNYA

Strategi sudah dipilih
dengan sesuai?

Indikator ditetapkan
dengan tepat?

KERTAS KERJA
PERENCANAAN



PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

DINAS PM DAN PTSP

DINAS PERINDUSTRIAN

DINAS PERDAGANGAN

DINAS PARIWISATA

DINAS KEHUTANAN

UJI DAHULU BAGAIMANA INSTANSI PEMERINTAH (IP) MEMBANGUN LINGKUNGAN PENGENDALIAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

INDIKATOR TUJUAN SPIP

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengamanan Aset Negara

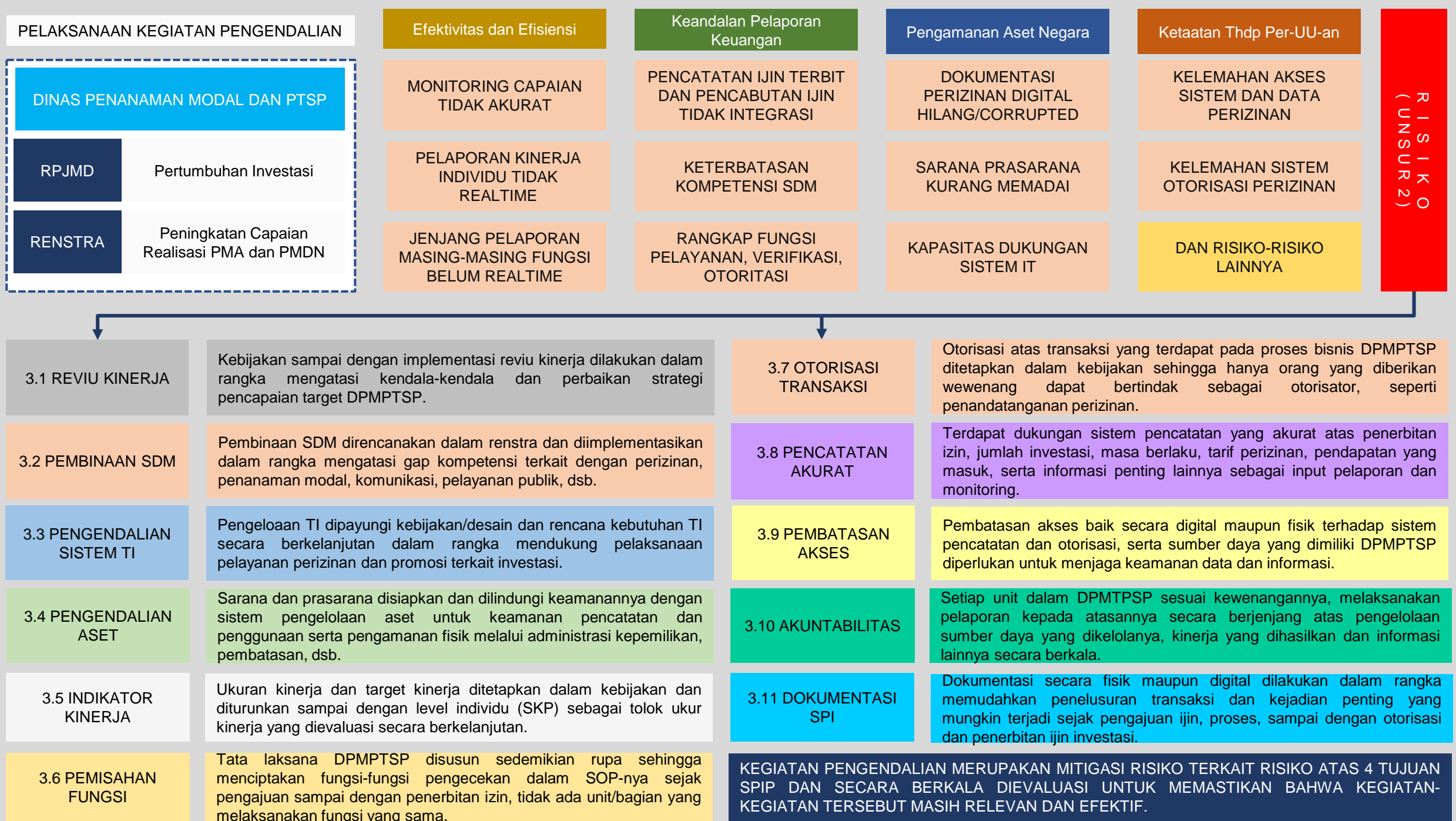
Ketaatan Terhadap Per-UU-an

KESIMPULAN

1.1	Pegawai menegakan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	▼	▼	▼	▼	▼
1.2	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	▼	▼	▼	▼	▼
1.3	Pimpinan organisasi mendukung penerapan pengendalian intern dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja	▼	▼	▼	▼	▼
1.4	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan probis dan masing-masing unit mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	▼	▼	▼	▼	▼
1.5	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi	▼	▼	▼	▼	▼
1.6	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	▼	▼	▼	▼	▼
1.8	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi	▼	▼	▼	▼	▼

LINGKUNGAN PENGENDALIAN DIBANGUN SEBAGAI PONDASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN SPIP, MR, DAN PENGENDALIAN KORUPSI

Lanjut Slide Berikutnya



4.1

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH

MENGUATKAN PERAN APIP

1.7

AUDIT CHARTER

5.2

MELAKSANAKAN EVALUASI TERPISAH

KAP APIP

Menetapkan Visi Misi Tujuan Strategis

Menetapkan Kebijakan-Kebijakan Penyelenggaraan SPIP

Kebijakan Pengendalian Intern, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan dan Aset, Kebijakan TI dan E-Gov, Reformasi Birokrasi, dan Lainnya

INDIKATOR TUJUAN SPIP

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Per-UU-an

DINILAI CAPAIANNYA DENGAN KK STRUKTUR DAN PROSES

SKOR DAN AREA OF IMPROVEMENT

INFORMASI & KOMUNIKASI

1.8

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

MEMBANGUN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

PIMPINAN ORGANISASI/UNIT KERJA

MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO

IKU

Uraian IKU

2.1

2.2

RISIKO STRATEGIS

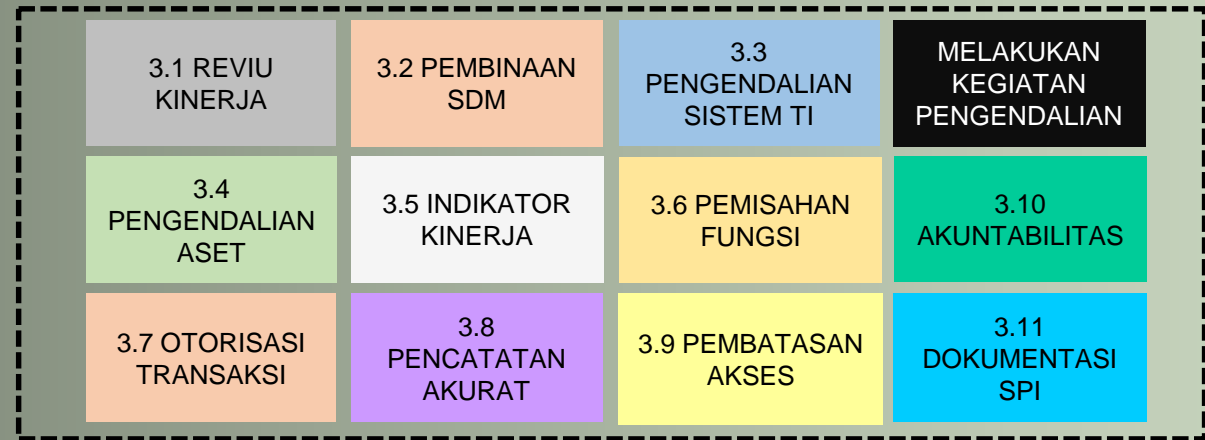
RISIKO OPERASIONAL

DAFTAR RISIKO STRATEGIS

DAFTAR RISIKO OPERASIONAL

RISIKO PRIORITAS (HIGH RISK) DITETAPKAN SESUAI SELERA RISIKO

P I B R R



PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN, MONEV KINERJA, TL HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN, DSB.

4.2

5.1

CONTOH PENGISIAN KERTAS KERJA

KERTAS KERJA T1
Subunsur 3.2
Pembinaan SDM

Parameter:
Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kriteria E:
Terdapat kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

Kriteria D:
Kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan

Kriteria C:
Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi

Kriteria B:
Kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya

Kriteria A:
Pembinaan SDM organisasi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur:
- Prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai
- Rencana pengembangan karir pegawai
- Sistem penilaian kinerja pegawai
- Sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai untuk seluruh pegawai baik pimpinan maupun staf

Penjelasan:
- Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan SDM
- Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai

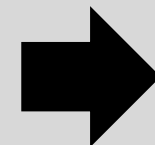
Penjelasan:
- Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi
- Pembinaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun
- Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangkan gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan SDM/Man

Penjelasan:
Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:
- Berkala
- Terdokumentasi
- Dilakukan untuk menangani residual risk
- Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti
- Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik

Penjelasan:
- Pembinaan SDM telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis
- Pembinaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pembinaan SDM-nya

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPSTSP telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti Diklat Investasi dan Penanaman Modal sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Pemkab.



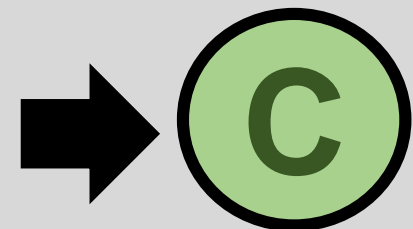
KERTAS KERJA T2
Subunsur 3.2
Pembinaan SDM

Parameter:
Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

<p>Kriteria E: Terdapat kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi</p>	<p>Kriteria D: Kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan</p>	<p>Kriteria C: Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan organisasi</p>	<p>Kriteria B: Kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya</p>	<p>Kriteria A: Pembinaan SDM organisasi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi</p>
<p>Penjelasan: Kebijakan telah mengatur: - Prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai - Rencana pengembangan karir pegawai - Sistem penilaian kinerja pegawai - Sistem kompensasi, program kesejahteraan, dan fasilitas pegawai untuk seluruh pegawai baik pimpinan maupun staf</p>	<p>Penjelasan: - Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan SDM - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural) dan pegawai</p>	<p>Penjelasan: - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi - Pembinaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun - Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangkan gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan SDM/Man</p>	<p>Penjelasan: Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik</p>	<p>Penjelasan: - Pembinaan SDM telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis - Pembinaan SDM telah berhasil meningkatkan kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pembinaan SDM-nya</p>

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan dan Diklat Pelaporan Keuangan sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mendukung keandalan pelaporan keuangan.



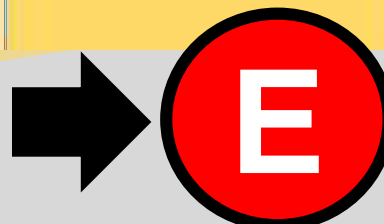
KERTAS KERJA T1
Subansur 1.3
Kepemimpinan yang Kondusif

Parameter:
Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.

<p>Kriteria E: Sudah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun belum memadai</p>	<p>Kriteria D: Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun pada tingkat strategis unit kerja belum memadai</p>	<p>Kriteria C: Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja</p>	<p>Kriteria B: Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja namun pada tingkat strategis K/L/D belum memadai</p>	<p>Kriteria A: Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D</p>
<p>Penjelasan: a. Instansi Pemerintah telah mengalokasikan dana implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan revaluasi dalam rencana kerja/DPA/DIPA, namun belum memadai, dan/atau b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko</p>	<p>Penjelasan: a. Instansi Pemerintah telah mengalokasikan dana implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan revaluasi dalam rencana kerja/DPA/DIPA secara memadai, namun belum memadai pada tingkat strategis unit kerja, dan/atau b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko</p>	<p>Penjelasan: a. Instansi Pemerintah telah mengalokasikan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan revaluasi dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi di tingkat operasional dan strategis unit kerja b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko</p>	<p>Penjelasan: a. Instansi Pemerintah telah mengalokasikan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan revaluasi dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi di tingkat operasional dan strategis unit kerja, namun masih terkendala kekurangan dana pada tingkat strategis K/L/D dan b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko serta kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat strategis K/L/D diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko</p>	<p>Penjelasan: a. Instansi Pemerintah telah mengalokasikan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan revaluasi dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja serta strategis K/L/D diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko</p>

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

DPMPTSP belum mengalokasikan anggaran yang spesifik akan digunakan dalam rangka implementasi MR di unit kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran yang digunakan untuk implementasi MR melekat dengan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja



KERTAS KERJA T4
Subunsur 2.2
Analisis Risiko

Parameter:

Terdapat kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis probabilitas dan signifikansi dampak bila suatu praktik korupsi terjadi dan mengevaluasinya dalam rangka menentukan respons yang tepat terhadapnya, yang menjangkau seluruh kegiatan utama organisasi dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan.

Kriteria E:

Penilaian risiko korupsi tidak berjalan

Kriteria D:

Unit kerja telah melakukan identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko korupsi yang teridentifikasi

Kriteria C:

Asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan terjadwal

Kriteria B:

Asesmen risiko korupsi pada kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan terjadwal. Ada bukti RTP dilaksanakan.

Kriteria A:

Rencana tindak pengendalian hasil asesmen risiko korupsi baik pada kegiatan utama maupun kegiatan pendukung telah dilaksanakan dan updating register risiko korupsi dilakukan secara periodik dan konsisten

Penjelasan:

Unit kerja tidak pernah melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko dan penyusunan kebijakan.

Penjelasan:

Unit kerja telah melakukan identifikasi risiko korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga belum diketahui risiko mana yang mempunyai tingkat keterjadian dan dampak yang tinggi maupun yang rendah.

Penjelasan:

Penilaian risiko korupsi telah dilakukan atas risiko yang diidentifikasi unit organisasi atau unit manajemen risiko. Peta risiko telah disusun dan rencana mitigasi dan pengendalian risiko korupsi telah diputuskan namun belum terdapat evaluasi atas rencana pengendalian risiko tersebut.

Penjelasan:

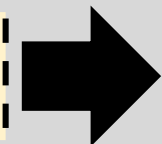
Asesmen risiko yang dilakukan unit kerja dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan unit kerja secara berkala mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian.

Penjelasan:

Seluruh proses manajemen risiko telah dilaksanakan oleh unit organisasi mulai dari identifikasi risiko korupsi, asesmen risiko korupsi, penyusunan rencana tindak pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dan pemutahiran risiko korupsi secara berkala.

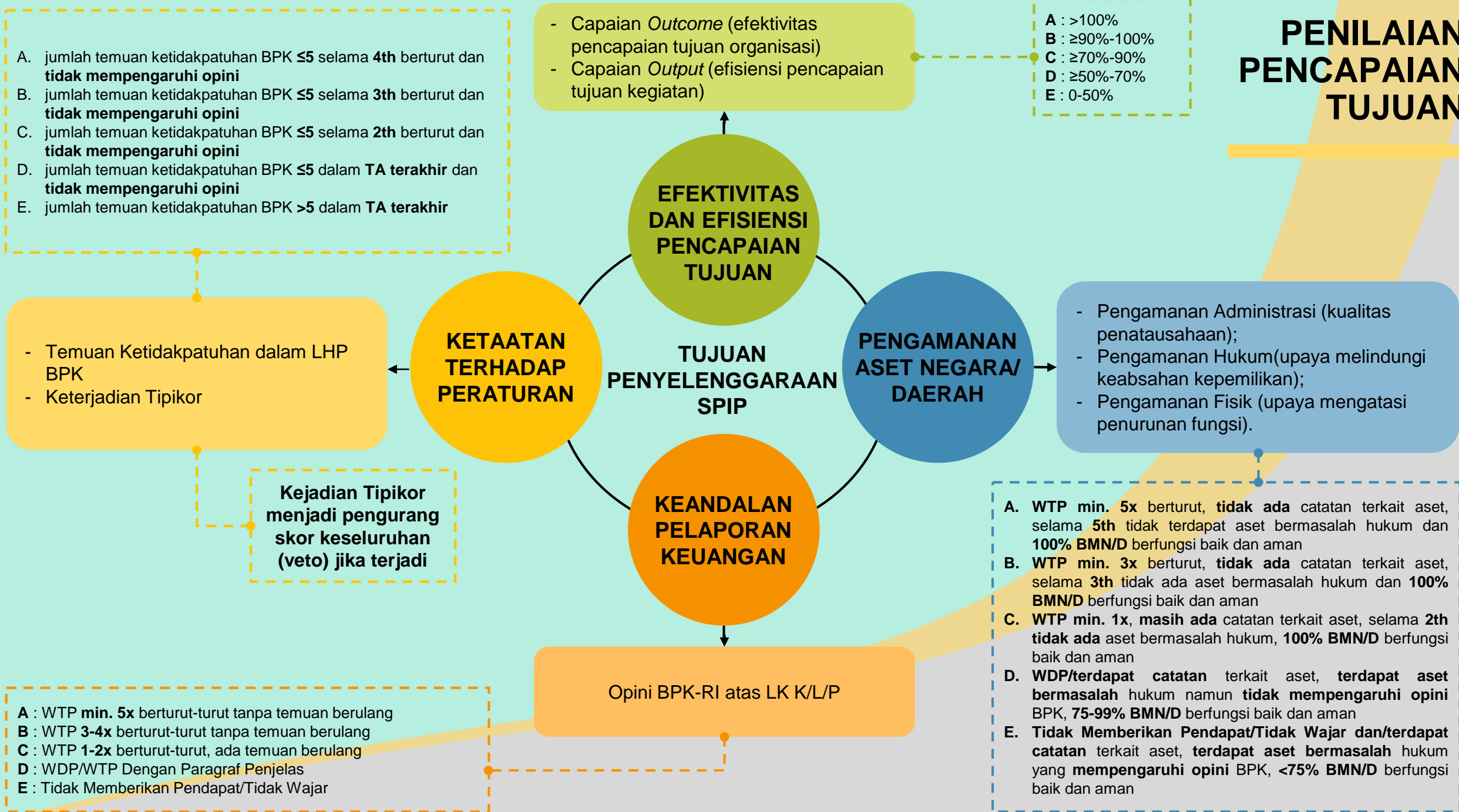
Kondisi Kabupaten Sunagakure:

DPMPTSP pada Pemkab Sunagakure sudah mengidentifikasi risiko, menyusun Risk Register dan RTP. Namun risiko terkait risiko korupsi belum diidentifikasi dan dimasukkan dalam Risk Register dan belum disusun RTP-nya.



**2.3. TAHAP PELAKSANAAN: PENILAIAN ATAS KOMPONEN III
PENILAIAN ATAS CAPAIAN
INDIKATOR HASIL (4 TUJUAN SPIP)**

PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN



- A : >100%
- B : ≥90%-100%
- C : ≥70%-90%
- D : ≥50%-70%
- E : 0-50%

- A. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 4th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**
- B. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 3th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**
- C. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 2th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**
- D. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 dalam TA terakhir dan **tidak mempengaruhi opini**
- E. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir

- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK
- Kejadian Tipikor

Kejadian Tipikor menjadi pengurang skor keseluruhan (veto) jika terjadi

- A : WTP **min. 5x** berturut-turut tanpa temuan berulang
- B : WTP **3-4x** berturut-turut tanpa temuan berulang
- C : WTP **1-2x** berturut-turut, ada temuan berulang
- D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas
- E : Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar

- A. WTP **min. 5x** berturut, **tidak ada** catatan terkait aset, selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan **100% BMN/D** berfungsi baik dan aman
- B. WTP **min. 3x** berturut, **tidak ada** catatan terkait aset, selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan **100% BMN/D** berfungsi baik dan aman
- C. WTP **min. 1x**, **masih ada** catatan terkait aset, selama 2th **tidak ada** aset bermasalah hukum, **100% BMN/D** berfungsi baik dan aman
- D. WDP/terdapat **catatan** terkait aset, **terdapat aset bermasalah** hukum namun **tidak mempengaruhi opini** BPK, **75-99% BMN/D** berfungsi baik dan aman
- E. **Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar dan/terdapat catatan** terkait aset, **terdapat aset bermasalah** hukum yang **mempengaruhi opini** BPK, **<75% BMN/D** berfungsi baik dan aman

PENILAIAN ATAS PENCAPAIAN TUJUAN – Alur Penilaian

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Perkin Kepala K/L/D dan Laporan Kinerja K/L/D Dapatkan Perkin Kepala Satker dan Laporan Kinerja Satker 	<ul style="list-style-type: none"> Hitung rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis K/L/D. 	Capaian <i>Outcome</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Hitung rata-rata pencapaian indikator <i>output</i> dari kegiatan satuan kerja 	Capaian <i>Output</i>
Keandalan Pelaporan Keuangan	Dapatkan Buku I dan Buku II LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.	Identifikasi informasi terkait Opini Laporan Keuangan K/L/D dalam 5 tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> Capaian subkomponen Keandalan Pelaporan Keuangan; Subunsur SPIP terkait.
Pengamanan atas Aset	Dapatkan Buku I dan Buku II LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengamanan administratif BMN/D; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengamanan hukum BMN/D; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengamanan fisik BMN/D; Subunsur SPIP terkait.
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Buku III LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 4 tahun terakhir; Dapatkan informasi terkait keterjadian korupsi di K/L/D. 	<ul style="list-style-type: none"> Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian ketaatan dalam LHP BPK-RI; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam periode yang dinilai dan/atau saat penilaian. 	Veto atas hasil penilaian subunsur terkait

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

No.	Pencapaian Tujuan			Capaian K/L/D
	Indikator	Definisi Indikator	Cara Pengukuran	
A	Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	3
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	5
B	Keandalan Pelaporan Keuangan			
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP 	3
C	Pengamanan atas Aset Negara/Daerah			
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	3
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	3
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	2
D	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
1.	Jumlah Temuan atas Ketidapatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	5
2.	Keterjadian Tindak Pidana Korupsi	Keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam tahun dan/atau saat penilaian	Ya

Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan

Gambaran Umum

Efektivitas dan efisiensi dalam PP 8/2006 dan Perpres 29/2014;

Pemahaman atas keseluruhan siklus pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian sebelumnya?

Skor

A : >100%

B : \geq 90%-100%

C : \geq 70%-90%

D : \geq 50%-70%

E : 0-50%

Pengukuran

Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D;

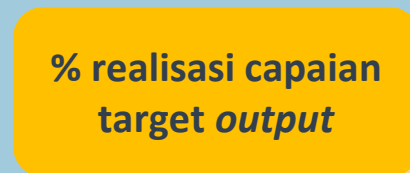
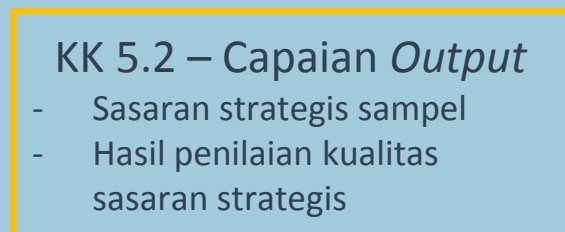
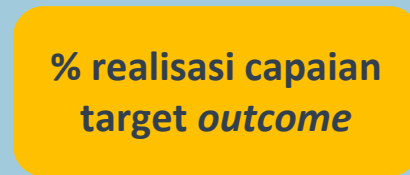
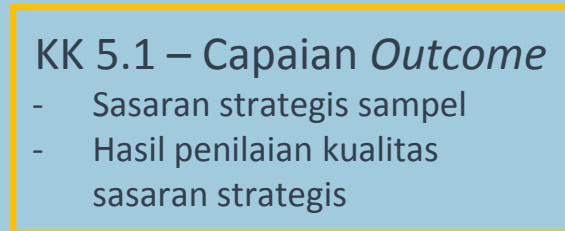
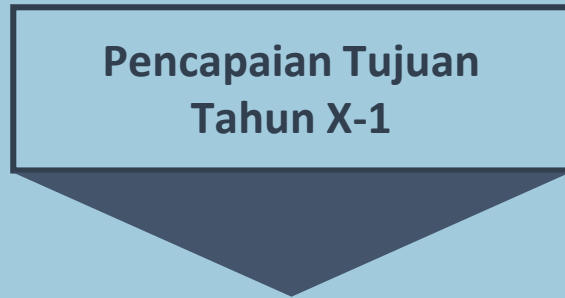
Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja.



Alur – Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Perkin Kepala K/L/D dan Laporan Kinerja K/L/D Dapatkan Perkin Kepala Satker dan Laporan Kinerja Satker 	<ul style="list-style-type: none"> Hitung rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis K/L/D. 	Capaian <i>Outcome</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Hitung rata-rata pencapaian indikator <i>output</i> dari kegiatan satuan kerja 	Capaian <i>Output</i>

Alur Pengisian KK T1



Setelah Penilaian Tahun Inisial

KK Penetapan Tujuan Tahun X

KK Pencapaian Tujuan Tahun X+1

KK 1 - Sasaran KLD

- Sasaran strategis sampel
- Hasil penilaian kualitas sasaran strategis

Input

KK 5.1 – Capaian *Outcome*

- Sasaran strategis sampel
- Hasil penilaian kualitas sasaran strategis

scoring

% realisasi capaian target *outcome*

KK 2 - Sasaran Satker

- Sasaran strategis sampel
- Hasil penilaian kualitas sasaran strategis

Input

KK 5.2 – Capaian *Output*

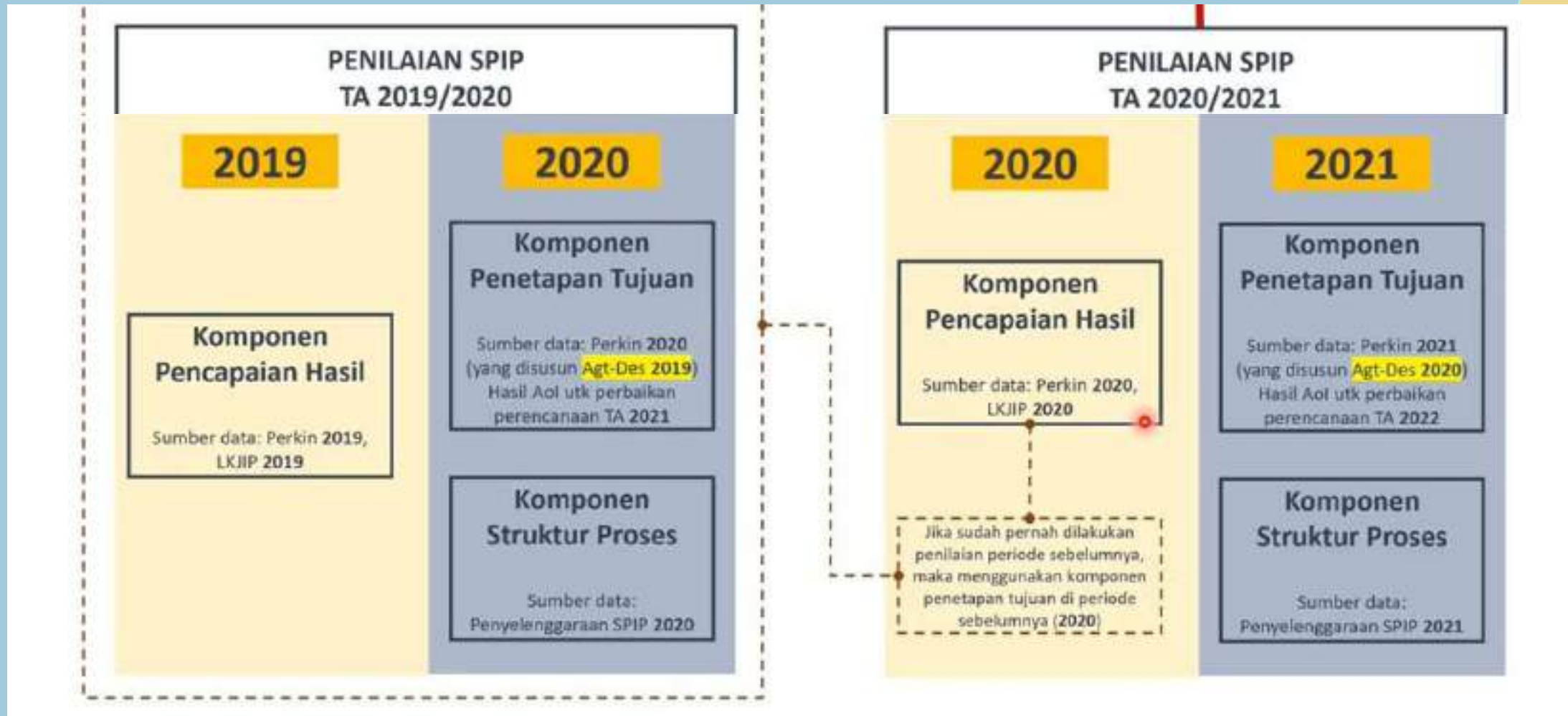
- Sasaran strategis sampel
- Hasil penilaian kualitas sasaran strategis

scoring

% realisasi capaian target *output*



Penilaian Mandiri sebagai siklus



Contoh Pengisian KK T1

KK 5.1 – Capaian Outcome

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA OUTCOME			CAPAIAN		
			SASARAN TEPAT	IK TEPAT	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
KINERJA OUTCOME								
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (%)	Y	Y	Y	5%	5%	100%
		Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)		Y	Y	2.04 hari	2.1 hari	100%
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
			Y/T	Y/T				

KK 5.2 – Capaian Output

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	KRITERIA OUTCOME		NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RELEVAN MENCAPI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TEPAT	NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KRITERIA OUTPUT			CAPAIAN		
			SASARAN TEPAT	IK TEPAT									RELEVAN MENCAPI SASARAN PROGRAM	IK TEPAT	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
KINERJA OUTCOME																		
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (%)	Y	Y	1	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Y	Y	1	Kegiatan event pariwisata unggulan	Jumlah event pariwisata unggulan	Y	Y		4	4	100%
			Lama tinggal wisatawan (Length of Stay/LoS)	Y	Y	2	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Parekraf	Indeks kualitas atraksi parekraf		Y	2	Akreditasi usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata terakreditasi	Y	Y	30	30	100%
				T	T					T				T	T			0
				T	T					T				T	T			0

Keandalan Pelaporan Keuangan

Gambaran Umum

Opini LK dalam UU 15/2004, UU 15/2006, SAP dan SPKN;

Pemahaman atas keseluruhan siklus pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian sebelumnya?

Skor

A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan berulang;

B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang;

C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang;

D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas;

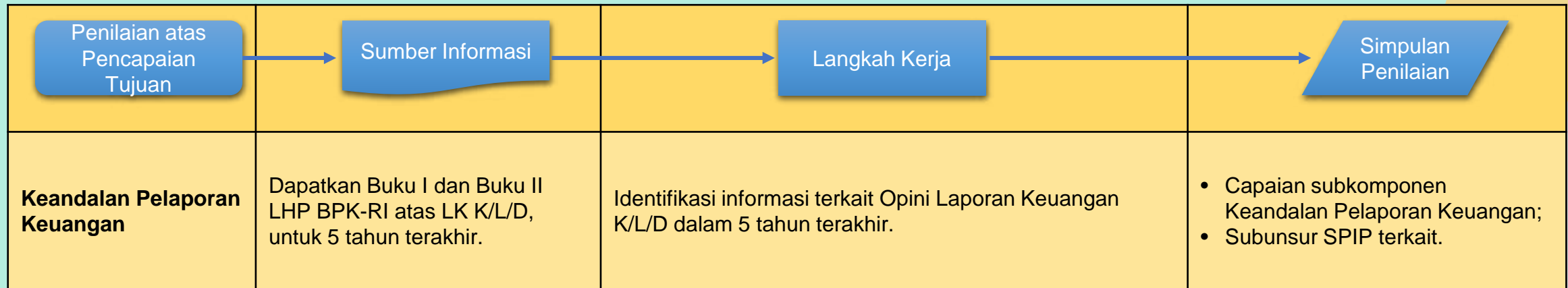
E : *Disclaimer*/Tidak Wajar.

Pengukuran

Mengidentifikasi informasi Opini Laporan Keuangan K/L/P dalam 5 tahun terakhir.



Alur –Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan



Kertas Kerja – Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
TUJUAN 2: KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
KK 6 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN**

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

No	Parameter	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
I	Opini	WTP/WTP DPP/MDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/MDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/MDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/MDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/MDP/Tidak Wajar/Disclaimer
		Penyebab Opini Tidak WTP: <i>(dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)</i>	Penyebab Opini Tidak WTP: <i>(dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)</i>	Penyebab Opini Tidak WTP: <i>(dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)</i>	Penyebab Opini Tidak WTP: <i>(dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)</i>	Penyebab Opini Tidak WTP: <i>(dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)</i>
II	Temuan					
	a Ringkasan <i>(uraikan secara ringkas substansi)</i>
	
	
	
	b Penyebab <i>(uraikan secara ringkas penyebab)</i>
	
	

Analisis:

1. Analisis apakah terdapat temuan dengan penyebab yang berulang dalam 5 tahun terakhir
2. Identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan berulang tersebut

Simpulan:

Berdasarkan hasil analisis dokumen ...

Capaian komponen Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan adalah:

C

KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP - KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4
I	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:
II	Temuan					
a	1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kota Magang Tahun 2018 Hasil Pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Belum Seluruhnya Diverifikasi;	1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kota Magang Belum Tertib;	1. Penatausahaan Kas pada Bendahara Penerimaan FKTP Belum Sesuai Ketentuan;	1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magang Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan;	1. Pembayaran SP2D LS Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp83.199.699.514,00 Tidak Dilakukan Melalui Rekening Perantara yang Tepat dan Ketidaktertiban Pendebetn RKUD oleh Bank Jatim;	
	2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Magang Tahun 2018 Belum Dilaksanakan Secara Memadai;	2. Pengelolaan Jasa Giro dan Penyajian Sisa Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada 16 Rekening Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pemerintah Kota Magang Tidak Sesuai Ketentuan;	2. Pelaksanaan Penyerapan dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 Belum Optimal;	2. Penganggaran Belanja Modal Perbaikan Mesin dan Peralatan Sebesar Rp1.195.301.000,00 Tidak Tepat;	2. Kendaraan Dinas pada Empat SKPD Senilai Rp7.460.857.400,00 Tidak Diketahui Keberadaannya;	
	3. Penatausahaan dan Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah kepada Pihak Ketiga oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magang belum Dilaksanakan Secara Memadai;	3. Serah Terima Sarana dan Prasarana Sebagai Dampak Pengalihan Urusan Pemerintahan Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dari Pemerintah Kota Magang Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Belum Optimal;	3. Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar atas Penyelenggaraan Reklame Tidak Sesuai Ketentuan;	3. Penatausahaan Pendapatan Retribusi pada BPKAD dan Dinas Pasar Tidak Memadai;	3. Pengelolaan Dana Kepesertaan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan oleh Dinas Pendidikan Kota Magang Tidak Tertib;	
	4. Potensi Pajak Reklame Minimal Sebesar Rp1.477.084.477,00 Belum Ditetapkan;	4. Penerbitan SKRD Retribusi IMB Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Potensi Piutang Retribusi IMB TA 2017 Sebesar Rp174.742.400,00 dan Potensi Denda yang Tidak Dapat Ditagihkan Minimal Sebesar Rp41.938.176,00;	4. Pemerintah Kota Magang Belum Menatausahakan dan Mengelola Aset Tetap Secara Memadai;	4. Pemerintah Kota Magang Belum Menatausahakan Aset Tetap Secara Memadai;	4. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp1.855.620.000,00 dan Pemakaian Aset Tanah serta Gedung dan Bangunan oleh Politeknik Kota Magang Belum Didukung Perikatan.	
	5. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Magang TA 2018 Belum Optimal serta Terdapat Kekurangan Penerimaan Sebesar Rp1.610.097.963,13 atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yaitu PT CGA;	5. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi Berjualan yang Tidak Terealisasi Minimal Sebesar Rp7.938.750,00;	5. Pemungutan Retribusi Pasar Tidak Sesuai Ketentuan.	5. Pertanggungjawaban Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magang Belum Sesuai Ketentuan;		
	6. Pengelolaan Jasa Giro pada 195 Rekening BOS Sekolah Dasar dan 27 Rekening BOS SMP pada Pemerintah Kota Magang Tidak Sesuai Ketentuan;	6. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Magang Belum Optimal;				
	7. Realisasi Belanja Barang dan	7. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota				

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3
		Jasa Kelurahan Kasin Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya Sebesar Rp31.030.000,00;	Magang TA 2017 Belum Tertib dan Belum Memberikan Hasil yang Optimal bagi Pemerintah Kota Magang Serta Potensi Penerimaan Belum Tertagih Sebesar Rp2.423.387.962,50;		
		8. Pembayaran Belanja Jasa Listrik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Belum Menunjukkan Kondisi yang Sebenarnya;	8. Hilangnya Potensi Penerimaan atas Penyalahgunaan Ijin Pemakaian Tempat Tertentu Milik Pemerintah Kota Magang		
		9. Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemerintah Kota Magang belum Berjalan Sesuai Ketentuan.			
	b Penyebab	1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas upaya penagihan Piutang;	1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas upaya penagihan Piutang;	1. Kelemahan dalam pengelolaan dana kapitasi;	1. Kelemahan dalam pelaksanaan anggaran belanja;
		2. Verifikasi dan inventarisasi atas subjek/objek pajak piutang PBB-P2 belum memadai;	2. Verifikasi dan inventarisasi atas subjek/objek pajak piutang PBB-P2 belum memadai;	2. Kelemahan Kepala SKPD dalam engendalaian pengelolaan dana DAK;	2. Kebijakan akuntansi belum diperbaharui;
		3. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN;	3. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN;	3. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN;	3. Kelemahan dalam pengendalain proses perencanaan dan penganggaran;
		4. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan BMD;	4. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan BMD;	4. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan BMD;	4. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi;
		5. Pengurus Barang belum optimal dalam pencatatan BMD;	5. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi;	5. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi;	5. Pengelola Barang belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN;
		6. Kebijakan dan Prosedur pemanfaatan BMD belum memadai;	6. Pengurus Barang belum optimal dalam pencatatan BMD;		6. Pengguna Barang belum melaksanakan penatausahaan BMD;

Analisis

- Temuan terkait dengan Pengelolaan PBB yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian dalam penagihan dan lemahnya verifikasi dan inventarisasi subjek/objek PBB, terjadi pada TA 2018 dan 2017;
- Temuan terkait dengan Pengelolaan BMD yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang dan lemahnya penatausahaan BMD oleh pengguna Barang, terjadi pada TA 2018, 2017, 2016 dan 2015;
- Temuan terkait dengan Pengelolaan Retribusi yang disebabkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi, terjadi pada TA 2017, 2016 dan 2015. Subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan di atas adalah subunsur **3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10.**

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dokumen, Pemerintah Kota Magang memperoleh opini WTP dari BPK-RI untuk TA 2014 sampai dengan 2018 (5 tahun berturut-turut). Namun demikian, pada periode tersebut, terdapat penyebab temuan yang berulang (belum ditindaklanjuti dengan tuntas) terkait dengan pendeloloaan PBB dan pengelolaan BMD.

Capaian komponen Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan adalah

C

Gambaran Umum

Mengapa pengamanan aset?;

Pengamanan Aset dalam PP 27/2014;

Pemahaman atas keseluruhan tahapan pengelolaan BMN pada PP 27/2014;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian sebelumnya dan dengan subkomponen pencapaian tujuan lainnya?

Skor

A : WTP min. 5x berturut, tidak ada catatan terkait aset, selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan 100% BMN/D berfungsi baik dan aman;

B : WTP min. 3x berturut, tidak ada catatan terkait aset, selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100% BMN/D berfungsi baik dan aman;

C : WTP min. 1x, masih ada catatan terkait aset, selama 2th tidak ada aset bermasalah hukum, 100% BMN/D berfungsi baik dan aman;

D : WDP/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset bermasalah hukum namun tidak mempengaruhi opini BPK, 75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman;

E : Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar dan/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset bermasalah hukum yang mempengaruhi opini BPK, <75% BMN/D berfungsi baik dan aman.

Pengukuran

Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir.



Alur – Penilaian Pengamanan atas Aset

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
Pengamanan atas Aset	Dapatkan Buku I dan Buku II LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir, dan Laporan BMN dari pengelola Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian pengamanan administratif BMN/D; • Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian pengamanan hukum BMN/D; • Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> • Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian pengamanan fisik BMN/D; • Subunsur SPIP terkait.

Kertas Kerja – Penilaian Pengamanan atas Aset

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
TUJUAN 3: PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH
KK 7 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH**

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

Parameter	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	Analisis
I Keamanan Administrasi	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	
	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Administrasi;
	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	2. Identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab catatan tersebut.
II Keamanan Hukum	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Hukum; 2. Identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab catatan/temuan tersebut.
III Keamanan Fisik	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik: (Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik: (Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik: (Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik: (Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik: (Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Fisik; 2. Identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab kondisi yang tidak optimal tersebut.

Simpulan:

Berdasarkan hasil analisis dokumen ...

Dari sisi keamanan administrasi ...

Dari sisi pengamanan hukum ...

Dari sisi pengamanan fisik

Capaian komponen pencapaian tujuan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

- 1. Keamanan Administrasi C
- 2. Keamanan Hukum C
- 3. Keamanan Fisik D

KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP PENGAMANAN ATAS ASET

Parameter		T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
I	Keamanan Administrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	Penyebab Opini Tidak WTP:	
		-	-	-	-	-	1. LK Pemkot Magang memperoleh opini WTP lima tahun berturut-turut, namun pada tahun anggaran 2017, terdapat catatan terkait aset pada opini BPK-RI;
		Catatan terkait Aset (jika ada): -	Catatan terkait Aset (jika ada): Pengelolaan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Magang, khususnya yang dimanfaatkan/ dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme pemberian ijin pemakaian tempat-tempat tertentu berpotensi merugikan karena adanya pengalihan hak, penyalahgunaan izin, dan lepasnya aset tanah yang tidak dikelola dengan baik sebagaimana terjadi atas 66 bidang (persil) tanah.	Catatan terkait Aset (jika ada): -	Catatan terkait Aset (jika ada): Pemerintah Kota Magang menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan PP Nomor 71 tentang SAP. Pemerintah Kota Magang tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK	Catatan terkait Aset (jika ada): Pemerintah Kota Magang menyajikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3,10 triliun. Atas nilai tersebut, Pemerintah Kota Magang belum menerapkan metode penyusutan Aset Tetap. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset sebagaimana telah ditetapkan dalam SAP pada Lampiran 1 Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penundaan pemberlakuan penyusutan atas Aset Tetap tersebut dapat dilakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2014.	2. Subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab catatan adalah subunsur 3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10.
II	Keamanan Hukum	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset:	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset:	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset:	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset:	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset:	1. Terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK untuk LK Tahun 2017;
		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2. Subunsur SPIP yang terkait

Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
		Pengelolaan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Magang, khususnya yang dimanfaatkan/ dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme pemberian ijin pemakaian tempat-tempat tertentu berpotensi merugikan karena adanya pengalihan hak, penyalahgunaan izin, dan lepasnya aset tanah yang tidak dikelola dengan baik sebagaimana terjadi atas 66 bidang (persil) tanah.				dengan penyebab catatan adalah subunsur 3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10.

III	Keamanan Fisik	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik:(Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik:(Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik:(Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	Persentase BMN/D dalam kondisi aman dan berfungsi baik:(Jumlah BMN/D dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMN/D)	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Fisik; 2. Identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan berulang tersebut.
-----	----------------	---	---	---	---	--

Simpulan:

Berdasarkan hasil analisis dokumen, meskipun Pemerintah Kota Magang memperoleh opini WTP dari BPK-RI untuk TA 2014 sampai dengan 2018 (5 tahun berturut-turut), pada periode tersebut, terdapat catatan terkait aset dalam opini BPK-RI atas LK Pemkot Magang. Dari sisi pengamanan hukum, terdapat temuan terkait kepemilikan aset yang berasal dari pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga pada tahun anggaran 2017. Dari sisi pengamanan fisik, berdasarkan hasil analisis, pada periode 2014 sampai dengan 2018 belum seluruh BMD Pemkot Magang berada pada kondisi aman dan berfungsi baik.

Capaian komponen pencapaian tujuan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

1	Keamanan Administrasi	C				
2	Keamanan Fisik	C				
3	Keamanan Hukum	D				

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Gambaran Umum

Ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan kejadian korupsi di Sektor Publik di Indonesia;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian sebelumnya dan dengan subkomponen pencapaian tujuan lainnya?

Skor

A : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤ 5 selama 4th berturut dan tidak mempengaruhi opini;

B : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤ 5 selama 3th berturut dan tidak mempengaruhi opini;

C : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤ 5 selama 2th berturut dan tidak mempengaruhi opini;

D : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤ 5 dalam TA terakhir dan tidak mempengaruhi opini;

E : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK > 5 dalam TA terakhir.

Pengukuran

Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Per-UU-an;

Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon III untuk pusat dan pejabat eselon IV untuk daerah.



Alur – Penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Buku III LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 4 tahun terakhir; Dapatkan informasi terkait keterjadian korupsi di K/L/D. 	<ul style="list-style-type: none"> Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian ketaatan dalam LHP BPK-RI; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon III untuk pusat dan pejabat eselon IV untuk daerah.. 	Veto atas hasil penilaian subunsur terkait

Kertas Kerja – Penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
TUJUAN 4: KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KK 8 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
I	Temuan Ketidapatuhan dalam LHP BPK						
	a Ringkasan <i>(uraikan secara ringkas substansi tiap butir temuan dalam Buku III LHP BPK-RI)</i>	<i>1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan terkait Temuan Ketidapatuhan dalam LHP BPK-RI; 2. Identifikasi subunsur Struktur dan Proses SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut.</i>
		
		
		
	b Penyebab <i>(uraikan secara ringkas penyebab tiap butir temuan dalam Buku III LHP BPK-RI)</i>	
		
		
		

II Keterjadian Tindak Pidana Korupsi

(Uraikan secara ringkas keterjadian tindak pidana korupsi yang terkait entitas)

1.
2.

Subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut adalah ...

Simpulan

...
Capaian komponen pencapaian tujuan Ketaatan terhadap Perundang-undangan adalah:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Temuan Ketidapatuhan dalam LHP BPK | D |
| 2 Keterjadian Korupsi | Ya |

KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
I	Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK						
a	Ringkasan	<p>1. Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp59.704.026,14.</p> <p>2. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di lima Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Perangkat Kerja Daerah sebesar Rp153.232.687,44.</p>	<p>1. Kelebihan pembayaran atas realisasi tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta dana operasional pimpinan DPRD Kota Magang sebesar Rp994.456.000,00.</p> <p>2. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.136.230.487,67.</p> <p>3. Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultansi pada lima SKPD sebesar Rp919.166.603,64.</p>	<p>1. Dua Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kekurangan Volume Sebesar Rp147.287.567,53</p> <p>2. Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp215.698.376,36</p> <p>3. Dinas Pendapatan Belum Mengenakan Sanksi Denda Administrasi kepada PPAT/Notaris yang Melanggar Ketentuan Minimal Sebesar Rp502.500.000,00</p> <p>4. Penggunaan Dana Cadangan Umum PDAM Sebesar Rp33.034.859.729,00 Tidak Didukung dengan Keputusan Walikota Magang</p>	<p>1. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp744.149.116,02 pada Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan</p> <p>2. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Magang sebesar Rp493.432.926,00</p> <p>3. Bagian Pendapatan yang Menjadi Hak Pemerintah Kota Magang atas Pengelolaan Kawasan Pasar Terpadu Dinoyo Belum Tertagih</p> <p>4. Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Sebesar Rp20.348.802.400,00 Belum Seluruhnya Disampaikan Kepada Walikota</p>	<p>1. Kekurangan Penerimaan Pajak Restoran atas Belanja Makanan dan Minuman SKPD TA 2014 Sebesar Rp796.584.728,18</p> <p>2. Kekurangan Penerimaan Pajak Hotel Sebesar Rp623.611.917,27 atas Kegiatan yang Dilaksanakan SKPD Pemerintah Kota Magang</p> <p>3. Pembayaran Sewa Sarana Mobilitas Darat Sebesar Rp21.265.565,90 Melebihi Ketentuan dan Pembayaran Sewa Gedung/Ruang Pertemuan Sebesar Rp307.400.503,20 Tidak Didukung Aspek Legalitas yang Memadai</p> <p>4. Pelaksanaan Delapan Paket Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp239.636.218,26</p>	<p>1. Temuan Ketidakpatuhan dalam Buku III LHP BPK-RI selama empat tahun berturut-turut tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK</p> <p>2. Subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut adalah 1.3, 1.5, 1.7, 3.1, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2</p>
b	Penyebab	<p>1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas dua paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan</p>	<p>1. TAPD dalam menghitung KKD tidak mengacu pada peraturan dan surat edaran yang mengatur.</p>	<p>1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas dua paket pekerjaan belanja modal peningkatan jalan</p>	<p>1. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas paket pekerjaan belanja modal peningkatan jalan</p>	<p>1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Dinas Pendapatan Daerah kurang optimal dalam melaksanakan penetapan, penagihan, dan pengawasan pengelolaan Pajak Restoran</p>	

No	Parameter	T	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
						kepada wajib pajak.	
		2. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan	2. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas sembilan paket pekerjaan belanja modal pengembangan jalan, pembangunan plengsengan, dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	2. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas empat paket pekerjaan belanja modal peningkatan jalan	2. Kurang selektif dalam membeli tiket pesawat; kurang teliti dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban; dan kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas	2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Dinas Pendapatan Daerah kurang optimal dalam melaksanakan penetapan, penagihan, dan pengawasan pengelolaan Pajak Hotel kepada wajib pajak.	
			3. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas belanja jasa konsultansi	3. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan BPHTB	3. PPKD tidak optimal dalam menagih bagian pendapatan parkir yang menjadi hak Pemerintah Kota Magang.	3. Kurang patuh batasan tertinggi pengeluaran pembayaran sewa yang ditetapkan Walikota; dan lalai untuk memproses perubahan penetapan SSH dalam Peraturan Walikota	
				4. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Magang dalam menggunakan Dana Cadangan Umum tidak sepenuhnya memperhatikan peraturan daerah yang berlaku.	4. PPKD kurang optimal dalam menghimpun laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial dari penerima hibah dan bantuan sosial.	4. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan delapan paket pekerjaan belanja modal	

II Keterjadian Tindak Pidana Korupsi

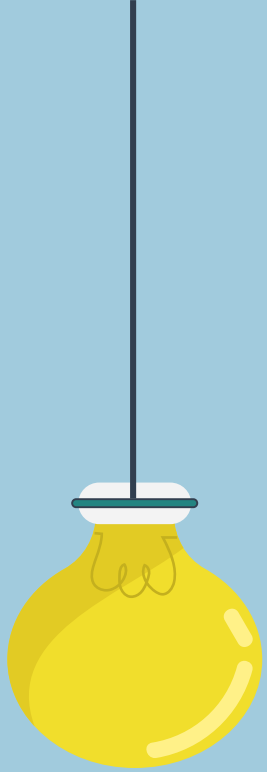
1. Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Magang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan terjerat kasus korupsi terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Magang Tahun Anggaran 2015. Kasus tersebut mulai dilimpahkan ke penuntutan pada bulan Juli 2018. Selain itu, pada awal 2019 Mantan Sekretaris Daerah Kota Magang juga ditetapkan tersangka atas pengembangan kasus suap ini. Dugaan penyusunan tersebut dalam rangka untuk memuluskan pembahasan APBD perubahan Pemerintah Kota Magang untuk Tahun Anggaran 2015.2. Subunsur SPIP yang terkait dengan kejadian tersebut adalah 1.1, 1.3, 1.7, 2.1, 3.1, 3.4, 3.7, 3.10

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dokumen, selama empat tahun berturut-turut temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK-RI tidak lebih dari lima temuan serta tidak memengaruhi opini BPK

Capaian komponen pencapaian tujuan Ketaatan terhadap Perundang-undangan adalah:

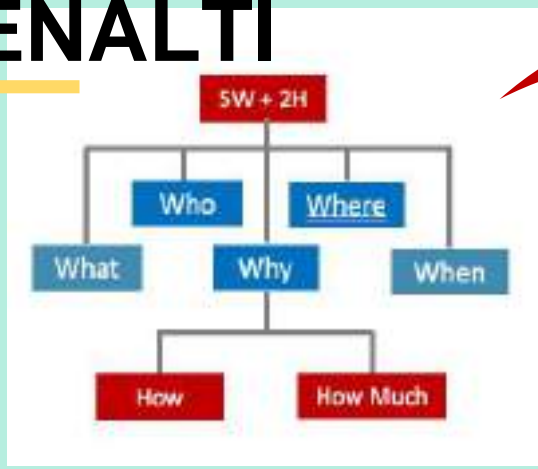
1	Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK	A				
2	Keterjadian Korupsi	Ya				



PROSES PENALTY

PROSES PENALTI

Analisis Kasus Korupsi



Klasifikasi Kasus

Informasi dari APH

- Kasus Korupsi Berjalan

Laporan Auditor Eksternal

- BPK

Laporan APIP

- Inspektorat dan BPKP

Media Massa

- Isu yang berkembang di masyarakat (Informasi Tambahan/Penguat)

SUMBER INFORMASI



Institusional
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi

Individual
Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa melibatkan pihak lain, baik secara hierarki maupun lintas fungsi

• Terhadap seluruh pilar dari IEPK

• Terhadap sub unsur SPIP dan MRI terkait dengan kasus korupsi

METODE PENALTI

Penalti terhadap MRI bergantung pada sub unsur SPIP terkait

Institusional	
SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.4
1.3	3.7
1.5	3.8
1.6	3.9
1.7	3.10
1.8	3.11
2.1	4.1
2.2	5.1
3.2	5.2

Individual	
SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.6
1.3	3.7
1.6	3.8
1.8	3.9
2.1	3.11
2.2	4.1
3.2	5.1
3.4	5.2

Penalti dilaksanakan dengan menurunkan gradasi per parameter

Penurunan maksimal adalah sampai dengan kebijakan (Gradasi E) untuk SPIP



Penalti terhadap pilar-pilar IEPK menyesuaikan pada hasil analisis

Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur

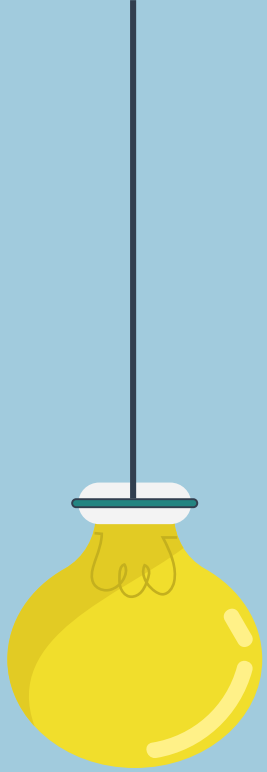
Tabel III.1 - Contoh Identifikasi Hubungan antara Subunsur Pengendalian Intern dan Kejadian Kasus Korupsi

STRUKTUR DAN PROSES		KASUS KORUPSI	
		INSTITUSIONAL	INDIVIDUAL
I	Lingkungan Pengendalian		
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Ya	Ya
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	Tidak	Tidak
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	Ya	Ya
1.4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Tidak	Tidak
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Ya	Tidak
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Ya	Ya
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Ya	Tidak
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Ya	Ya
II	Penilaian Risiko		
2.1	Identifikasi Risiko	Ya	Ya
2.2	Analisis Risiko	Ya	Ya
III	Kegiatan Pengendalian		
3.1	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	Tidak	Tidak
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Ya	Ya
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan	Tidak	Tidak

STRUKTUR DAN PROSES		KASUS KORUPSI	
		INSTITUSIONAL	INDIVIDUAL
	Sistem Informasi		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	Ya	Ya
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	Tidak	Tidak
3.6	Pemisahan Fungsi	Tidak	Ya
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Ya	Ya
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	Ya	Ya
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Ya	Ya
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Ya	Tidak
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	Ya	Ya
IV	Informasi dan Komunikasi		
4.1	Informasi yang Relevan	Ya	Ya
4.2	Komunikasi yang Efektif	Tidak	Tidak
V	Pemantauan		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	Ya	Ya
5.2	Evaluasi Terpisah	Ya	Ya

METODE PENALTI (KK LEAD II)

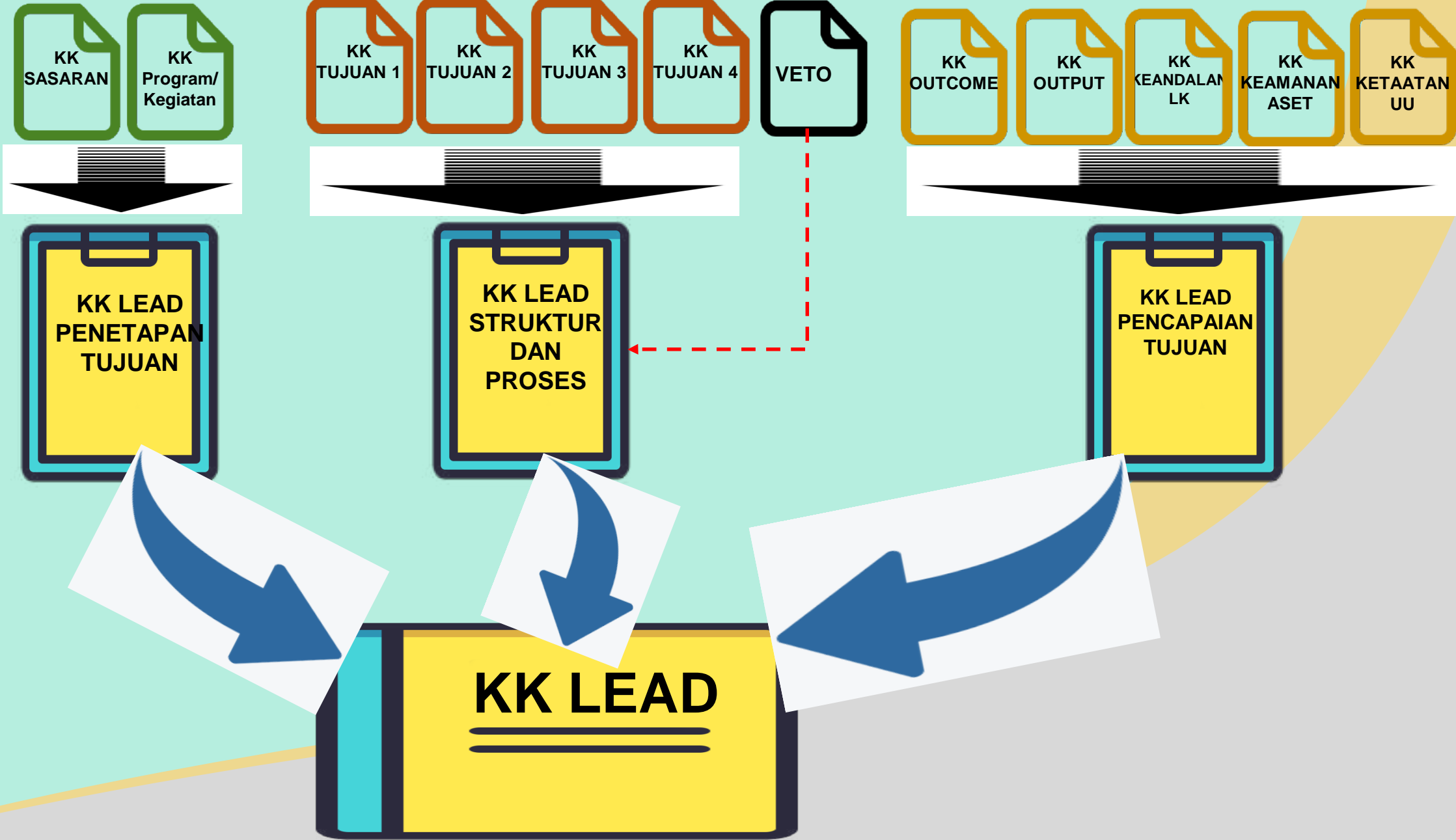
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ... Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX										Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direvisi	:	:	:
KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KK LEAD II - STRUKTUR DAN PROSES										KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR	
Kode	Uraian Subsusu r	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGA N NILAI	ASET NILAI				KETAATAN NILAI
				SPIP	MRI	IEPK							
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika						2	2	3	3	2,5	YA	1,50
1.1		1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku	SPIP	-	-					2,5		1,50
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.1		5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.1		7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.1		8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK				3	3		1,50
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi						3	3	3	3	3	TIDAK	3,00
1.2		1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		3,00
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif						2,5	2,5	2,5	2,714285714	2,553571429	YA	1,55
1.3		1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		1,55
1.3		2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2		1,55
1.3		3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	3	3	3	3	3		1,55
1.3		4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	2	2	2	2	2		1,55
		5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK				3	3		1,55
		6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK				3	3		1,55
		7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK				3	3		1,55
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan						3	3	3	3	3	TIDAK	3,00



2

Hubungan antar Kertas Kerja

STRUKTUR KERTAS KERJA



KERTAS KERJA PENYIMPULAN NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP						
Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4	50,00%		2,00		
Kualitas Program dan Kegiatan	3	60,00%		1,80		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		3,50		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		1,400	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,500	3,75%		0,06		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,875	3,75%		0,07		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,08		
Penujudan Peran APIC yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	3,75%		0,11		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,750	10%		0,18		
Analisis Risiko (2.2)	1,817	10%		0,18		
Kegiatan Pengendalian						
Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Revisi atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2,000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2,000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,950	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5%		0,14		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,000	7,50%		0,15		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,750	7,50%		0,13		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	2,208	0,663	
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES						

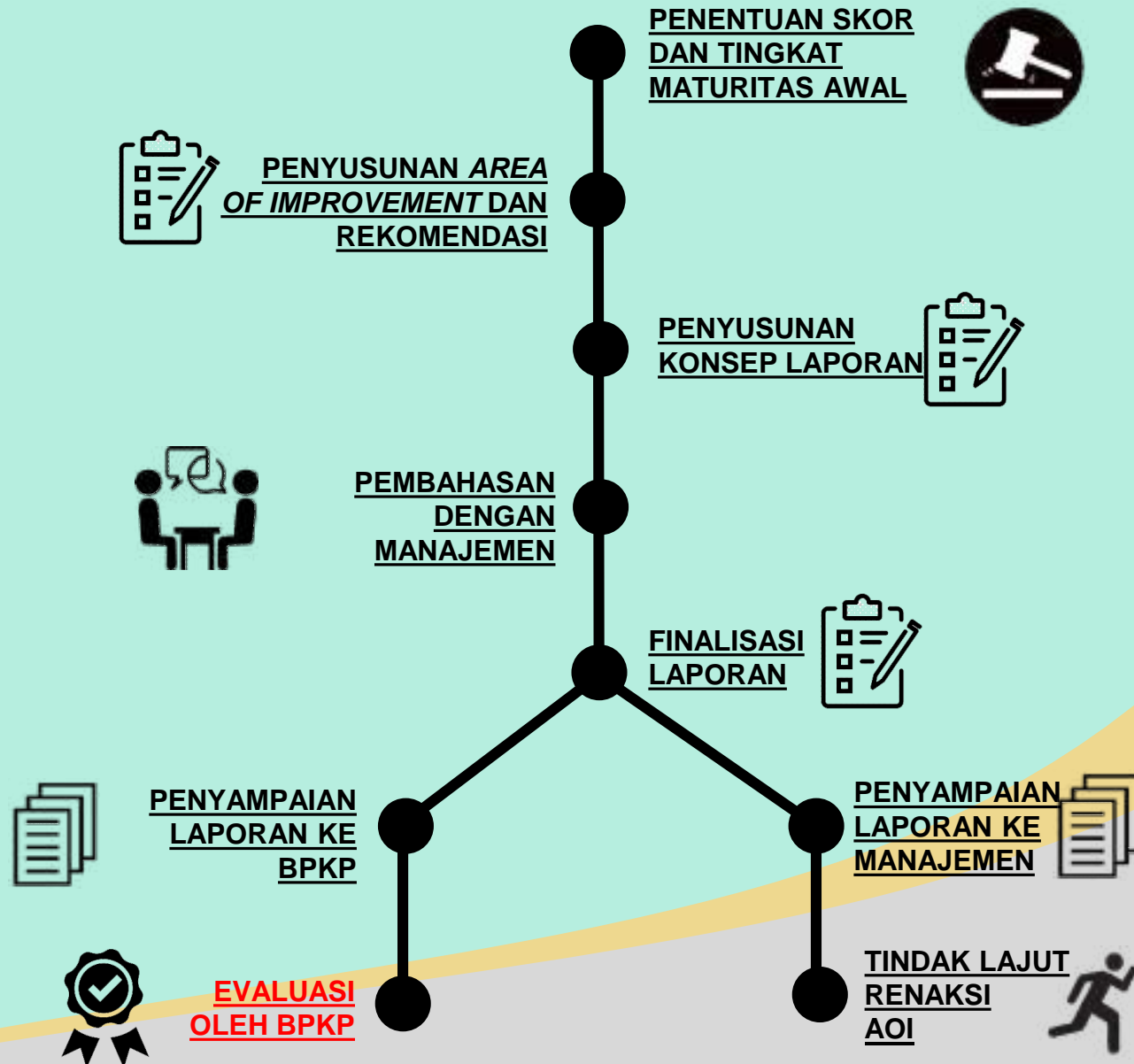
HASIL KK Lead Penetapan Tujuan

HASIL KK Lead Pencapaian Tujuan

HASIL KK Lead Struktur & Proses

PENCAPAIAN TUJUAN				
Efektivitas dan Efisiensi				
Capaian Outcome	3	15%		0,45
Capaian Output	5	15%		0,75
Keandalan Laporan Keuangan				
Opini LK	3	25%		0,75
Pengamanan atas Aset				
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30
Keamanan Fisik	3	5%		0,15
Keamanan Hukum	2	10%		0,20
Kepatuhan pada Peraturan				
Temuan Ketaatan - PPK	5	20%		1,00
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,60
BOBOT HASIL			30,00%	1,08
NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP				
				3,131
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS				
PERENCANAAN				
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40,00%		1,40	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,50	1,40	
KAPABILITAS				
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,89	0,09	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,75	0,09	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,00	0,10	
KEMITRAAN	2,50%	3,00	0,08	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,86	0,23	
HASIL	30,00%		0,68	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,82	0,34	
OUTCOMES	11,25%	3	0,34	
TOTAL	100,00%		2,67	
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI				
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI				
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,80	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,50	0,11	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,88	0,14	
POWER (KUASA & WEWEANG)	14,40%	1,88	0,27	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN				
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,82	0,16	
SALURAN LAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	1,95	0,07	
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	1,88	0,17	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,50	0,11	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,50	0,11	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI				
INVESTIGASI	8,00%	1,50	0,12	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,50	0,12	
TOTAL	100%		1,66	
				NILAI SPIP
				NILAI MRI
				NILAI IEPK

TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

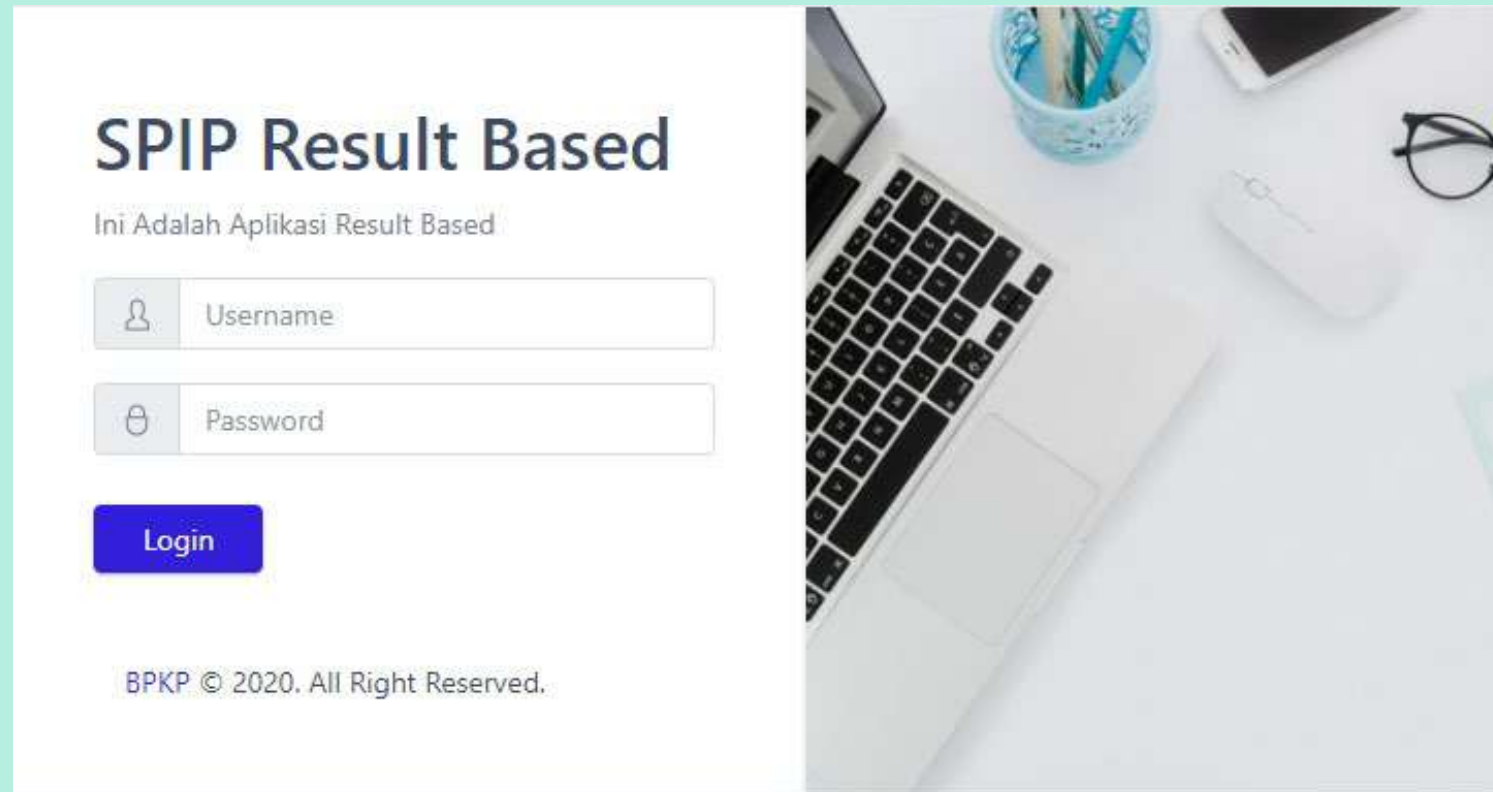


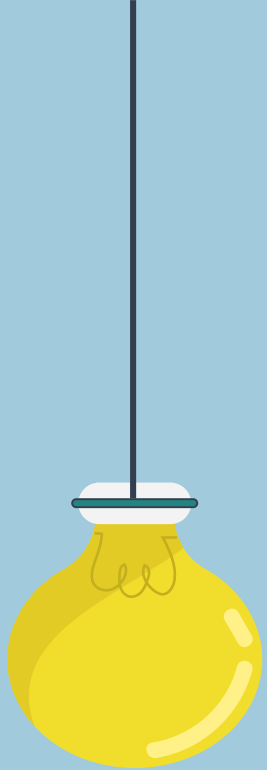
SLIDE BERIKUT

Progres Aplikasi?

Link Uji oba:

<https://apip.bpkp.go.id/spip-ujicoba/webmanager/cetak/kklead2/97.bpkp>





3

Latihan

PRAKTIK SIMULASI PENGISIAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

PEMBAGIAN KELOMPOK - KELAS A					
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....
	Pemda A	Pemda B	Pemda C	Pemda D	Pemda E



LINK KERTAS KERJA:

<http://bit.ly/.....>

LINK BAHAN:

<http://bit.ly/.....>

PRAKTIK SIMULASI PENGISIAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

PEMBAGIAN KELOMPOK - KELAS B					
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....	http://bit.ly/.....
	Pemda A	Pemda B	Pemda C	Pemda D	Pemda E



LINK KERTAS KERJA:

<http://bit.ly/.....>

LINK BAHAN:

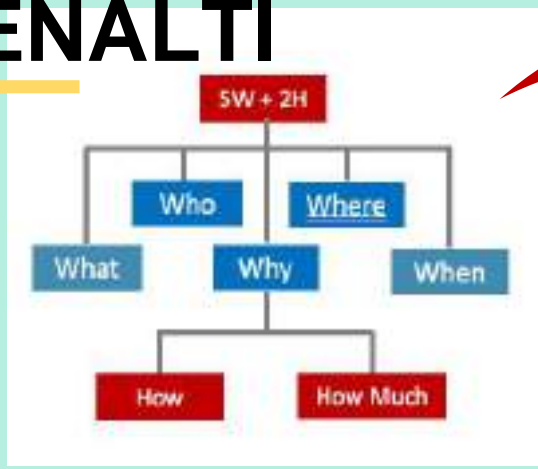
<http://bit.ly/.....>

2.4. TAHAP PELAKSANAAN: PENGARUH KETERJADIAN KORUPSI/PENALTI

**KETERJADIAN KORUPSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
UNSUR SPIP, MRI DAN IEPK**

PROSES PENALTI

Analisis Kasus Korupsi



Klasifikasi Kasus

Informasi dari APH

- Kasus Korupsi Berjalan

Laporan Auditor Eksternal

- BPK

Laporan APIP

- Inspektorat dan BPKP

Media Massa

- Isu yang berkembang di masyarakat

SUMBER INFORMASI



Institusional
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi

Individual
Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa melibatkan pihak lain, baik secara hierarki maupun lintas fungsi

• Terhadap seluruh pilar dari IEPK

• Terhadap sub unsur SPIP dan MRI terkait dengan kasus korupsi

METODE PENALTI

Penalti terhadap MRI bergantung pada sub unsur SPIP terkait

Institusional	
SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.4
1.3	3.7
1.5	3.8
1.6	3.9
1.7	3.10
1.8	3.11
2.1	4.1
2.2	5.1
3.2	5.2

Individual	
SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.6
1.3	3.7
1.6	3.8
1.8	3.9
2.1	3.11
2.2	4.1
3.2	5.1
3.4	5.2

Penalti dilaksanakan dengan menurunkan gradasi per parameter

Penurunan maksimal adalah sampai dengan kebijakan (Gradasi E) untuk SPIP

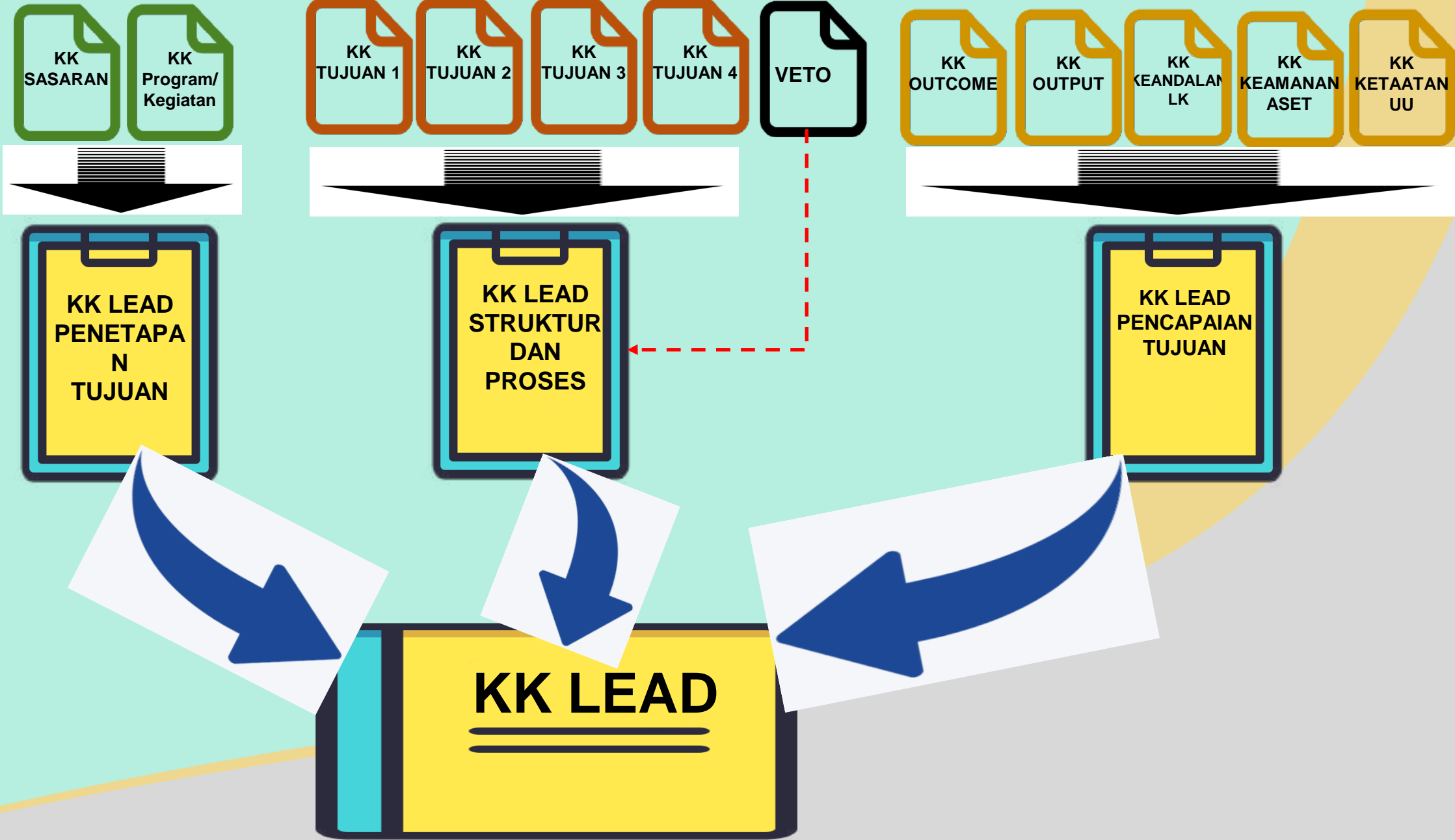


Penalti terhadap pilar-pilar IEPK menyesuaikan pada hasil analisis

Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur

**2.5. TAHAP PELAKSANAAN: PENYIMPULAN NILAI SPIP, MRI, DAN IEPK
KERTAS KERJA LEAD DAN PENYIMPULAN SKOR
SPIP, MRI, DAN IEPK DENGAN DAN TANPA VETO**

STRUKTUR KERTAS KERJA



Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,500	3,75%	0,11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%	0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,875	3,75%	0,07		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%	0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%	0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%	0,08		
Perwujudan Peran APSP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%	0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	3,75%	0,11		
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko (2.1)	1,750	10%	0,18		
Analisis Risiko (2.2)	1,817	10%	0,18		
Kegiatan Pengendalian					
Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%	0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%	0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%	0,07		
Pengendalian Risiko atas Aset (3.4)	3,000	2,27%	0,07		
Penetapan dan Revisi atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%	0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%	0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,000	2,27%	0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%	0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2,000	2,27%	0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2,000	2,27%	0,05		
Dokumentasi yang Baik atas Sistem serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%	0,05		
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan (4.1)	1,950	5%	0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5%	0,14		
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,000	7,50%	0,15		
Evaluasi Terhadap (5.2)	1,750	7,50%	0,13		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	2,208	0,663
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES					

HASIL KK Lead Penetapan Tujuan

HASIL KK Lead Pencapaian Tujuan

HASIL KK Lead Struktur & Proses

PENCAPAIAN TUJUAN				
Efektivitas dan Efisiensi				
Capaian Outcome	3	15%	0,45	
Capaian Output	5	15%	0,75	
Keandalan Laporan Keuangan				
Opini LK	3	25%	0,75	
Pengamanan atas Aset				
Keamanan Administrasi	3	10%	0,30	
Keamanan Fisik	3	5%	0,15	
Keamanan Hukum	2	10%	0,20	
Kepatuhan pada Peraturan				
Temuan Keataatan - PPK	5	20%	1,00	
SUB JUMLAH HASIL		100,00%	3,60	
BOBOT HASIL			30,00%	1,08
NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP				3,131

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS				
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40,00%		1,40	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,50	1,40	
KAPABILITAS	30,00%		0,59	
KEPENIMPINAN	5,00%	1,09	0,09	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,75	0,09	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,00	0,10	
KEMITRAAN	2,50%	3,00	0,08	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,86	0,23	
HASIL	30,00%		0,68	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,82	0,34	
OUTCOMES	11,25%	2	0,34	
TOTAL	100,00%		2,67	
NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI				1,66

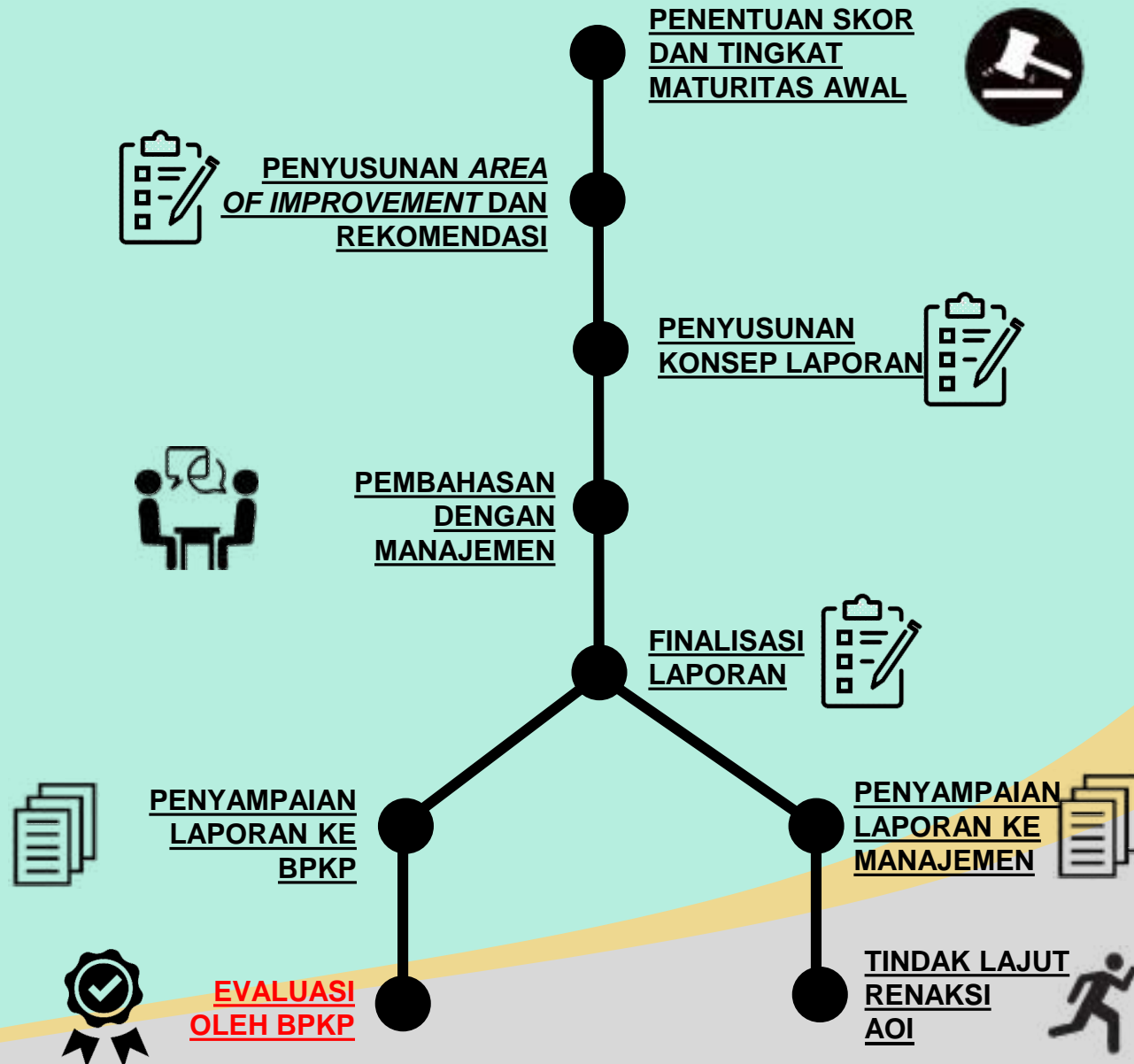
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,80	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,50	0,11	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,88	0,14	
POWER (KUASA & WEWEANG)	14,40%	1,88	0,27	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,62	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,82	0,16	
SALURAN LAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	1,95	0,07	
KEPENIMPINAN ETIS	9,00%	1,88	0,17	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,50	0,11	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,50	0,11	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,24	
INVESTIGASI	8,00%	1,50	0,12	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,50	0,12	
TOTAL	100%		1,66	

NILAI SPIP

NILAI MRI

NILAI IEPK

3. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN



SLIDE BERIKUT

3

EVALUASI ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI

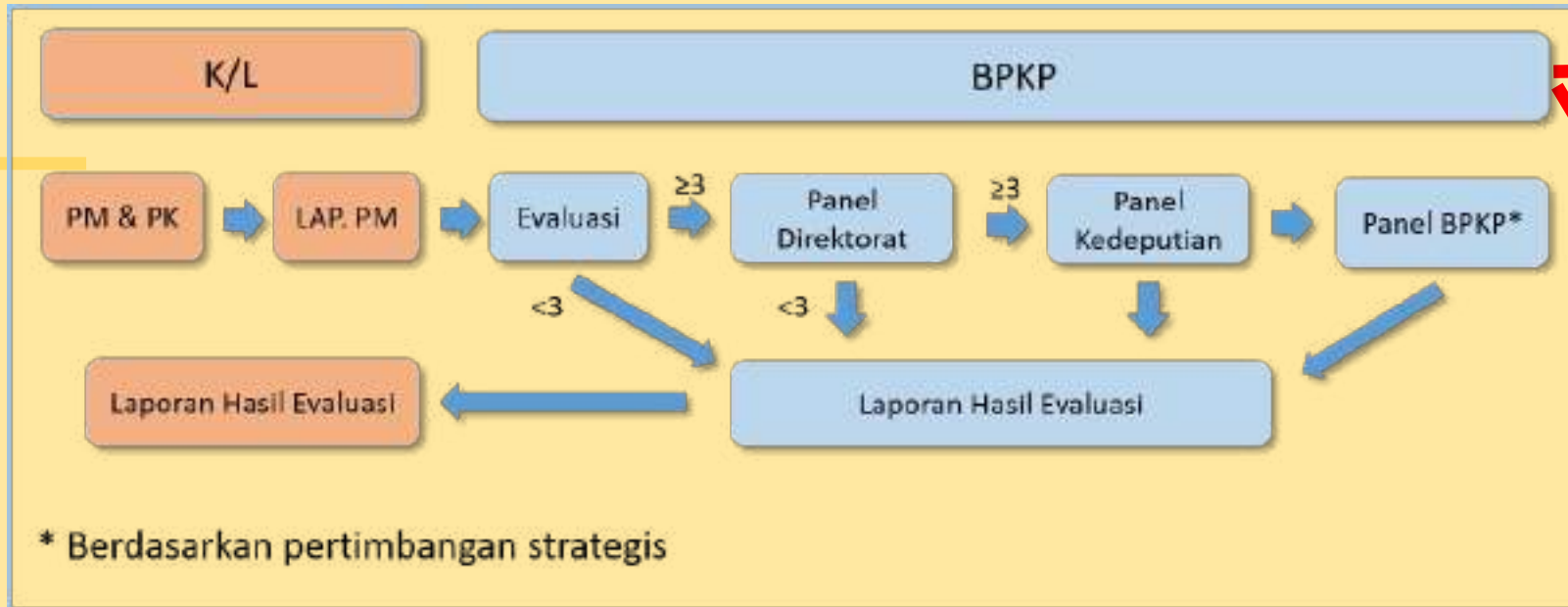


1. PERBANDINGAN PROSES DI BPKP SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN

HAL	LAMA	BARU
Kegiatan	Penjaminan Kualitas	Evaluasi (Kegiatan Penjaminan Kualitas dilakukan oleh APIP pada saat Penilaian Mandiri)
Periode Pelaksanaan	Sesuai Permintaan	Serentak pada Bulan Juli – Agustus Setiap Tahun
Jumlah Hari Penugasan	Tidak ditentukan	Minimal 20 Hari
Tim	Tidak ditentukan	Tim Evaluasi = diutamakan bukan tim yang melaksanakan pembinaan pada K/L/D untuk menghindari moral hazard
Hasil PM yang dilakukan Evaluasi	Minimal Level 2	Semua Hasil Penilaian
Pelaksanaan Ekspos Panel	Tidak ditentukan/tidak seragam	Untuk hasil evaluasi level 3, dilakukan ekspos secara berjenjang pada 3 Tingkatan Ekspos, yaitu: Tim Panel Eselon II (Direktorat Mitra K/L atau Perwakilan BPKP) Tim Panel Kedeputian Tim Panel BPKP (berdasarkan pertimbangan strategis)
Laporan Hasil Evaluasi	Diterbitkan oleh Eselon 1	Diterbitkan oleh Eselon 2 Evaluasi K/L : Direktorat Terkait Evaluasi Pemda : Perwakilan BPKP

ALUR PROSES

Pada K/L

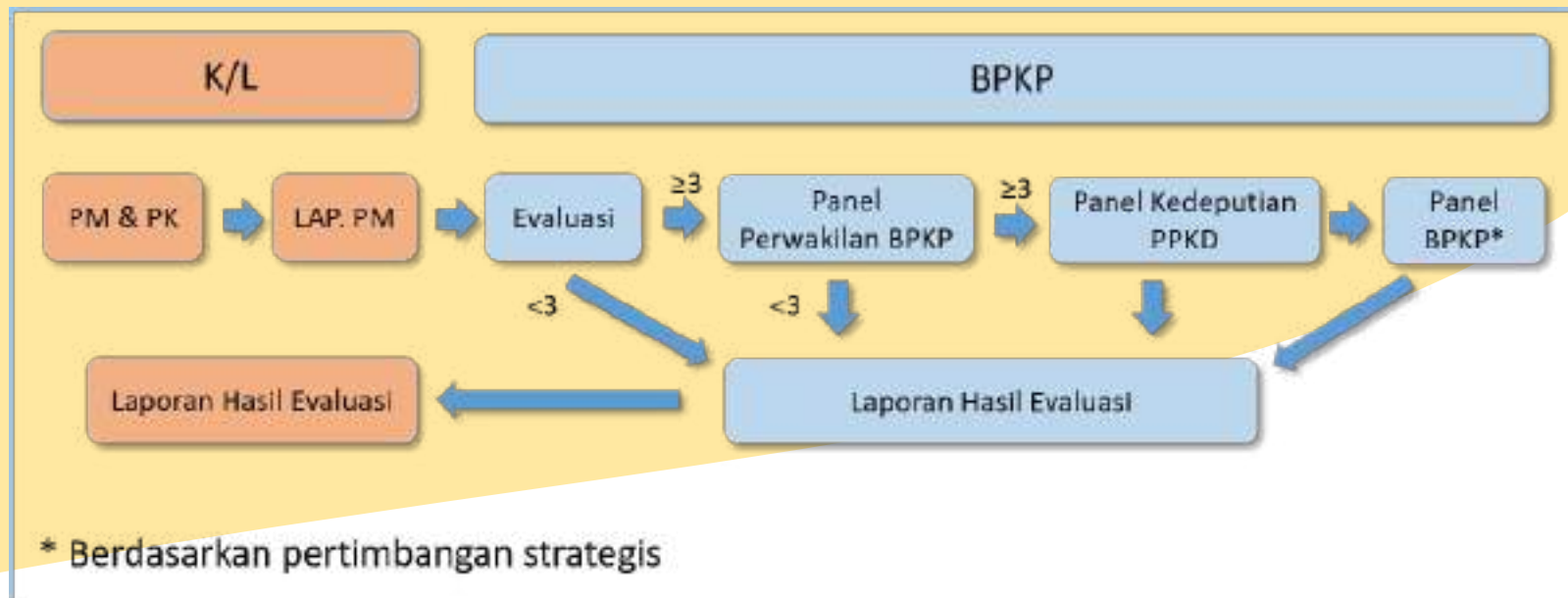


* Berdasarkan pertimbangan strategis

KEWAJIBAN PANEL INTERNAL DI TINGKAT KEDEPUTIAN

KETENTUAN TERKAIT PANEL BPKP

Pada Pemda



* Berdasarkan pertimbangan strategis

KETENTUAN TERKAIT PANEL BPKP

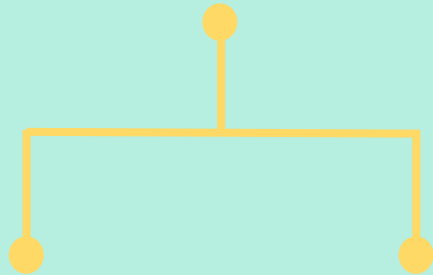
PROSES DI DEPUTI PPKD HANYA EKSPON

LAP. DITERBITKAN OLEH PERWAKILAN

2. TAHAPAN EVALUASI

A. TAHAP PERSIAPAN

1) PEMBENTUKAN TIM



Perwakilan BPKP

Bidang yang menangani SPIP, MR dan IEPK

Kedeputian BPKP

- Direktorat Mitra K/L
- Dapat ditambahkan tim Direktorat dari Kedeputian Investigasi

2) PENETAPAN HARI DAN JADWAL

Acuan

No.	Kegiatan	HP
1.	Desk Evaluasi	20%
	Pelaksanaan evaluasi berdasarkan data yang telah diterima (laporan hasil penilaian mandiri dan dokumen pendukung)	
	Penyusunan rencana/program kerja penjaminan kualitas di lokasi K/L/P	
2.	Penugasan di lokasi K/L/P	60%
	<i>Entry Meeting</i>	
	Kegiatan wawancara, observasi dan reviu dokumen	
	<i>Exit Meeting</i>	
3.	Penyusunan Laporan	20%

3) PENETAPAN SATUAN KERJA SAMPEL

Minimal **50%**

Proporsional sesuai kebutuhan pengujian

2. TAHAPAN EVALUASI

B. TAHAP PELAKSANAAN EVALUASI

ATAS PROSES

No.	Tahapan	Bobot
1	Persiapan PM	20%
2	Pelaksanaan	60%
3	Pelaporan PM	20%

No.	Skor	Gradasi
1	$\geq 80\% \leq 100$	Sesuai
2	$\geq 56\% \leq 79$	Kurang Sesuai
3	$\leq 55\%$	Tidak Sesuai

ATAS SUBSTANSI

ANALISIS DAN PENGUJIAN SUBSTANSI SESUAI KRITERIA DAN PARAMETER

PENGUJIAN BUKTI melalui:

- Wawancara
- Reviu dokumen
- Observasi

OUTPUT EVALUASI

BERITA ACARA

Ikhtisar hasil Evaluasi, ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan Tim Penjamin Kualitas (APIP K/L/P)

DRAFT LAPORAN HASIL

- Hasil Evaluasi atas proses dan hasil
- Informasi kenaikan dan penurunan skor hasil Penjaminan Kualitas
- *Area of Improvement*
- Rekomendasi perbaikan

HASIL EVALUASI AKAN DIPUTUSKAN DENGAN EKSPOS PANEL

2. TAHAPAN EVALUASI

C. EKSPOS PANEL

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

EKSPOS INTERNAL KEDEPUTIAN



Tim Panel:
dipimpin oleh
Direktur

Proses:
Tim Evaluasi memaparkan
hasil evaluasi
Tim panel menguji hasil
evaluasi



EKSPOS LEVEL KEDEPUTIAN



Tim Panel:
Seluruh Direktur atau
pejabat yang ditunjuk
dan dipimpin oleh
Deputi

Proses:
Tim Panel Direktorat
memaparkan hasil evaluasi
Tim panel menguji hasil
evaluasi



PADA PEMERINTAH DAERAH

EKSPOS INTERNAL



Tim Panel:
Minimal 3 Korwas,
dipimpin Kepala
Perwakilan

Proses:
Tim Evaluasi
memaparkan hasil
Tim panel menguji
hasil evaluasi



EKSPOS KEDEPUTIAN PPKD



Tim Panel:
Dipimpin oleh Deputi
PPKD atau pejabat
yang ditunjuk

Proses:
Tim Panel Perwakilan
BPKP memaparkan hasil
Tim panel menguji hasil
Evaluasi



Berdasarkan Pertimbangan Strategis, Tim Panel Kedepuitan dapat merekomendasikan untuk dilakukan ekspos kepada Tim Panel BPKP, jika Tim Panel tidak merekomendasikan, maka Hasil Evaluasi diputuskan oleh Tim Panel Kedepuitan

EKSPOS LEVEL BPKP



Tim Panel:
Seluruh Deputi atau pejabat
yang ditunjuk dan dipimpin
oleh Kepala BPKP

Proses:
Tim Panel Kedepuitan
memaparkan hasil
Tim panel menguji hasil Evaluasi



Hasil Ekspos Panel:

**SKOR, AOI, DAN
REKOMENDASI
PERBAIKAN**

2. TAHAPAN EVALUASI

D. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN



TERIMA KASIH



SAHABAT PENGENDALIAN